

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS YAYASAN PKMK NUSANTARA TAHUN 2020 - 2025



Wisma Griya Nusa Bangsa, Jl. KH. Sholeh Iskandar km 4, Cibadak, Tanah Sareal,
Bogor – 16166

Telepon (0251)-7543582 E-mail : yayasannusantara284@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Yayasan PKMK Nusantara periode tahun 2020-2025. Selama periode ini, kami telah bekerja untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sesuai Anggaran Dasar yang kita miliki.

Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, termasuk pengembangan program, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam laporan ini, kami sajikan secara rinci tentang kegiatan yang telah kami lakukan, capaian yang telah kami raih, dan tantangan yang kami hadapi. Kami juga menyampaikan rencana ke depan untuk meningkatkan kinerja Yayasan dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan menjadi acuan untuk pengembangan Yayasan di masa depan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kerja kami selama 5 tahun terakhir. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat.

Bogor, 12 Agustus 2025

Yayasan Pengembangan Keterampilan dan
Mutu Kehidupan (YPKMK) Nusantara
Ketua

Ir. Doddy Imron Cholid, M.S.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Sistematika.....	1
BAB II KONDISI YAYASAN PKMK NUSANTARA 2020 – 2025	3
2.1. Struktur Organisasi.....	3
2.2. Perkembangan Unit Kegiatan	5
2.2.1. Universitas Nusa Bangsa (UNB) Bogor.....	6
2.2.2. SMK AK Nusa Bonga	13
2.2.3. SMK Nusa Bangsa Jampang.....	15
2.2.4. SMK Jenderal Bambang Sugeng	16
2.2.5. Wisma Griya Nusa Bangsa	16
2.3. Sumber Daya Manusia	18
2.3.1. SDM Yayasan.....	18
2.3.2. SDM Unit Kegiatan.....	19
2.4. Aset Yayasan	20
2.4.1. Aset Tidak Bergerak.	20
2.4.2. Sarana dan Prasarana.....	21
2.4.3. Aset Bergerak.....	21
BAB III KONDISI KEUANGAN	22
3.1. Sumber-sumber Keuangan	22
3.2. Realisasi Keuangan	23
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
4.1. EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN.....	34
4.1.1. Strategi Stabilitas atau Rationalisasi Tahun 2021-2025, atau biasa diistilahkan dengan strategi Recovery.....	36
4.1.2. Strategi Diversifikasi atau strategi Pengembangan Tahun 2026 – 2030	37

4.1.3. Strategi Agresif Tahun 2031–2035.....	37
4.1.4. Strategi Go-Internasional Tahun 2036 – 2040	37
4.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS.....	38
4.2.1. Evaluasi Pemilihan Strategis	38
4.2.2. Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis	38
4.3. MASALAH STRATEGIS	40
4.3.1. Masalah Strategis Periode Tahun 2021-2025.....	40
4.3.2. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2021.....	41
4.3.3. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2022	42
4.3.4. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2023	42
4.3.5. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2024.....	43
4.3.6. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2025	44
BAB V PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS	46
5.1. Pengawasan Internal Organ Pengawas	46
5.2. Pengawasan Internal Penjaminan Mutu UNB	50
5.3. Rekomendasi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan Internal	52
5.4. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal.....	53
5.5. Pengawasan Eksternal	53
5.5.1. Tim Audit Eksternal dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSIA),	53
5.5.2. KPP Pratama Kota Bogor.....	54
5.5.3. ADI dan DEKI Registered Public Accountant.....	54
BAB VI	57
PENUTUP	57
6.1. Kesimpulan	60
6.2. Rekomendasi.....	61
6.2.1. Rekomendasi Penyusunan Program Dan Kegiatan Strategis	61
6.2.2. Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Yayasan.....	62
6.2.3. Rekomendasi Mengatasi Kesulitan Keuangan.....	62
6.2.4. Rekomendasi Peningkatan Kinerja UNB	63
6.2.5. Rekomendasi Pengembangan Unit SMK.....	64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perkembangan Program Studi/Jurusan di UNB dan SMK	5
Tabel 2.2. Penerimaan Jumlah Mahasiswa UNB Tahun 2020/2021 – 2024/2025	6
Tabel 2.3. Prestasi Non Akademik yang dicapai oleh SMK AK Nusa Bangsa Tahun 2023 dan 2024	14
Tabel 2.4. Pegawai di Lingkungan Yayasan 2020/2021– 2024/2025	19
Tabel 2.5. Kondisi Aset Tanah Yayasan Tahun 2025	21
Tabel 2.6. Perkembangan Aset Kendaraan Tahun 2021 - 2025	21
Tabel 3.1. Sumber-sumber Keuangan Yayasan dan Unit Kegiatan	22
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2020	23
Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2021	23
Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2022	23
Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2023	24
Tabel 3.6. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024	25
Tabel 4.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Periode 2021 - 2025	38
Tabel 5.1. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan UNB	46
Tabel 5.2. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan SMK-AK NB	47
Tabel 5.3. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan SMK-NB Jampang	48
Tabel 5.4. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan SMK-JBS Temanggung	49
Tabel 5.5. Hasil Temuan Pemeriksaan Yayasan PKMK Nusantara	49

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1. Perkembangan Mahasiswa UNB TA 2020/2021 – 2024/2025 1</i>	8
<i>Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Agroteknologi 1</i>	9
<i>Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Agribisnis 1</i>	9
<i>Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Kimia 1</i>	10
<i>Gambar 2.5. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Biologi 1</i>	10
<i>Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Akuntansi 1</i>	10
<i>Gambar 2.7. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Manajemen 1</i>	11
<i>Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Kehutanan 1</i>	11
<i>Gambar 2.9. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Penyuluh Kehutanan 1</i>	12
<i>Gambar 2.10. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Magister Ekonomi Pembangunan1</i>	12
<i>Gambar 2.11. Perkembangan Siswa SMK-AK Nusa Bangsa Per Jurusan TA 2020/2021 – 2024/2025 1</i>	13
<i>Gambar 2.12. Perkembangan Siswa SMK Nusa Bangsa Jampang Per Prodi TA 2020/2021 – 2024/2025 1</i>	15
<i>Gambar 2.13. Perkembangan Siswa SMK JBS Temanggung Per Prodi TA 2020/2021 – 2024/2025 1</i>	16
<i>Gambar 2.14. Perkembangan Penghuni Asrama Tahun 2020 –2025 1</i>	17
<i>Gambar 2.15. Perkembangan Penyewa Wisma GNB Tahun 2020 –2025 1</i>	17
<i>Gambar 2.16. Perkembangan SDM Organ Yayasan Tahun 2020 –2025 1</i>	18
<i>Gambar 2.17. Perkembangan Pegawai Yayasan Tahun 2021 –2025 1</i>	19
<i>Gambar 2.18. Perkembangan Pegawai UNB Tahun 2020/2021 – 2024/2025 1</i>	20

Gambar 3.1. Perkembangan Keuangan Perkembangan Keuangan (Saldo, Pendapatan dan Belanja) Tahun 2020/2021 – 2024/20251.....25

Gambar 4.1. Rencana Induk Pengembangan (Roadmap) Yayasan PKMK Nusantara 2021-2040 1..... 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Yayasan ini didirikan atas prakarsa Bapak I Made Sandy (Alm), Direktur Tata Guna Tanah (TGT) Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri saat itu, yang menginginkan agar para karyawan TGT dapat mengembangkan keterampilan dan tingkat pendidikan mereka, serta berkarya bagi nusa dan bangsa dalam bidang pendidikan dan pelatihan.

Pada tanggal 7 Mei 1982 bertempat di Bogor berkumpul sekelompok orang yang ingin mewujudkan keinginan itu. Sebagai landasan kerja untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah disepakati maka dirumuskan secara bersama Anggaran Dasar Yayasan pada tanggal 20 Mei 1982, sehingga tanggal 20 Mei ditentukan sebagai hari jadi Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan (PKMK) Nusantara yang dikukuhkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H.No. 37 Tanggal 27 Mei 1982. Yayasan ini bersifat independen, tidak berpihak atas suku, ras, agama dan partai politik serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kemandirian, bertanggungjawab dan hidup bermartabat. Maksud dan tujuan Yayasan bergerak dalam bidang Sosial, khususnya pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi.

Laporan Kepengurusan Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan (PKMK) Nusantara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam menjalankan amanah dan kegiatan yayasan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang program kerja dan kegiatan, serta pencapaian yayasan selama periode 2020 – 2025. Laporan ini juga akan memberikan informasi tentang tantangan dan peluang yang kami hadapi, serta rencana ke depan untuk meningkatkan kinerja dan dampak yayasan. Dalam laporan ini akan disajikan informasi tentang kondisi Yayasan PKMK Nusantara 2020 – 2025, kondisi keuangan, program dan kegiatan, pengawasan dan akuntabilitas, serta masalah strategis.

1.2. Dasar Hukum

Anggaran Dasar Tahun 2011, Anggaran Rumah Tangga revisi 2025 dan Renstra Yayasan PKMK Nusantara 2021-2025.

1.3. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Sistematika

BAB II. KONDISI YAYASAN PKMK NUSANTARA 2020 – 2025

2.1. Struktur Organisasi

2.2. Perkembangan unit Kegiatan

2.3. Sumber Daya Manusia

2.4. Aset yayasan

BAB III. KONDISI KEUANGAN

3.1. Sumber-sumber keuangan

3.2. Realisasi Keuangan

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Evaluasi Rencana Induk Pengembangan

4.2. Evaluasi Program Strategis

4.3. Masalah Strategis

BAB V. PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

5.1. Pengawasan Internal Organ Pengawas

5.2. Pengawasan Internal Penjaminan Mutu UNB

5.3. Pengawasan Eksternal

BAB VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2. Rekomendasi

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders* yayasan, membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yayasan. Melalui laporan ini juga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan yayasan baik berupa uang, pikiran dan tenaga, sehingga laporan ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama dalam memajukan masyarakat.

BAB II

KONDISI YAYASAN PKMK NUSANTARA 2020 – 2025

2.1. Struktur Organisasi

Yayasan PKMK Nusantara terdiri dari tiga organ, yaitu Pembina, Pengurus, Pengawas. Organ Pengurus, dibantu oleh Pelaksana Kegiatan yang didasarkan pada program dan kegiatan sesuai RENSTRA sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa SDM Organ bersifat pengabdian, beberapa diantaranya sudah purna tugas, dan juga masih ada yang menjalankan aktivitas lainnya diluar yayasan. Pengurus melaksanakan kegiatan sehari-hari dilakukan secara tatap muka dan daring.

2.1.1. Organ Pembina

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Pembina mempunyai wewenang antara lain: menetapkan kebijakan umum Yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan, serta mengesahkan laporan tahunan.

Saat ini Pembina terdiri 6 (enam) orang, sebagai Ketua merangkap anggota Dr. Ir. Sempa Ukur Sinulingga, Sekretaris merangkap anggota Ir. Retno Sulistyowati dan anggota Pembina lainnya adalah: J.A. Soetjipto, Dr. Ir. Barijadi Prawirosastro, MS., Ir. Nurarifin Sahabudin Muhibat, M.Si., dan Ir. Sriyati Hadisaputro, MS.

2.1.2. Organ Pengurus

Kepengurusan periode tahun 2020–2025 dipimpin oleh Ketua Ir. Doddy Imron Cholid, M.S, berdasar Keputusan Ketua Pembina No. 039/KEP Pem/YPKMK/B/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020. Sekretaris Beni Hermawan, S.Si., M.Si. dan Bendahara Ir. Choep Tolandho, M.M. sesuai Akta Notaris Nomor 67 Tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Yayan Sutiati, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0011851 tanggal 16 Februari 2021.

Seiring berjalannya waktu kegiatan di Unit UNB memerlukan jabatan Wakil Rektor II. Karena keterbatasan SDM maka yang dipandang memenuhi persyaratan adalah Ir. Choep Tolando yang saat itu menjabat sebagai Bendaharawan Yayasan. Selanjutnya Jabatan Bendaharawan digantikan oleh Dicky Qoharuddin.

Dalam melaksanakan kegiatan, kepengurusan ini dibantu 3 (tiga) Pelaksana Kegiatan atau Divisi yaitu Divisi Tata Kelola Kelembagaan diketuai oleh Ir. Nining Sriwahyuni, MM., Ph.D., Divisi Penataan Aset Dan Diversifikasi Usaha diketuai Ir. Anggraeni Purnami, M.M., dan Divisi Hukum Dan Kerja Sama diketuai oleh Durapati Sinulingga, S.H., Bagian Tata Usaha diketuai oleh Elda Djuanda, S.H. jumlah pelaksana kegiatan sebanyak 12 orang, Sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan PKMK Nusantara Nomor 109/SK/YPKMK/IV/2023, tanggal 28 April 2023 tentang Susunan Pengurus Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

PENASEHAT:

- | | |
|--|---|
| (1) Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum. | (9) Yuniar Hikmat Ginandjar, S.H., M.H. |
| (2) Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc. | (10) Rudy Rubijaya, S.P, M.Sc. |
| (3) Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. | (11) Tatang Sofyan, S.H., M.H. |
| (4) Ir. Joko Heryadi, M.M. | (12) Dr. Iing Sadikin, S.H., M.H. |
| (5) Ir. Bahrunsyah, S.H., M.Si. | (13) Uunk Din Parunggi, S.Si., MAP. |
| (6) Ir. Arif Pasha, M.M. | (14) Darsini, S.H., M.M. |
| (7) Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. | (15) Drs. Roli Irawan, S.H., M.M., M.H. |
| (8) Dra. Bertha Sunarmi, M.Si. | |

KETUA	: Ir. Doddy Imron Cholid, M.S.
SEKRETARIS	: Beni Hermawan, S.Si., M.Si
BENDAHARA	: Dicky Qoharuddin
TATA USAHA	: Elda Juanda, S.H.
	: Ir. Cho pep Tolandho, M.M.
	: Agus Effendi

DIVISI – DIVISI:

- (1) DIVISI TATA KELOLA KELEMBAGAAN
Ketua : Ir. Nining Sriwahyuni, MM., Ph.D.
: Anwarul Fatah, S.H.
: Ali Rachman, A.Ptnh.
- (2) DIVISI PENATAAN ASET DAN DIVERSIFIKASI USAHA
Ketua : Ir. Anggraeni Purnami, M.M.
: Robani Santoso, S.S.
: Hadi Surono
- (3) DIVISI HUKUM DAN KERJA SAMA
Ketua : Durapati Sinulingga, S.H.
: Yoyon Sonjaya, S.H., M.H.
: Purwadi, S.H.

2.1.3. Organ Pengawas

Sejak tanggal 28 April 2024 Ir. Agus Widayanto, M.Si telah disetujui Ketua Organ Pembina mengundurkan diri karena kesehatan. Ketua Organ Pengawas saat ini dijabat Ir. Suyudi, M.M. merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota Drs. Bambang Budi Sardjono, M.S. dan mulai bulan Agustus 2023 telah diangkat Ibu Luki Ambarwinarti, S.E. sebagai anggota.

Untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ke depan, Pengurus akan bekerjasama dengan Akuntan Publik eksternal independen, untuk melakukan audit keuangan, baik terhadap Yayasan (termasuk Griya Nusa Bangsa) maupun seluruh Unit Kegiatan.

2.2. Perkembangan Unit Kegiatan

Tabel berikut menunjukkan perkembangan Program Studi/Jurusan dan Kompetensi Keahlian di UNB, SMK AK Nusa Bangsa, SMK Nusa Bangsa dan SMK Jenderal Bambang Sugeng Temanggung.

Tabel 2.1. Perkembangan Program Studi/Jurusan di UNB dan SMK 1

No	UNIT KEGIATAN	PROGRAM STUDI / KOMPETENSI KEAHLIAN				
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	UNIVERSITAS NUSA BANGSA	Agroteknologi	Agroteknologi	Agroteknologi	Agroteknologi	Agroteknologi
		Agribisnis	Agribisnis	Agribisnis	Agribisnis	Agribisnis
		Kimia	Kimia	Kimia	Kimia	Kimia
		Biologi	Biologi	Biologi	Biologi	Biologi
		Akuntansi	Akuntansi	Akuntansi	Akuntansi	Akuntansi
		Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
		Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan	Kehutanan
		Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan
2	SMK AK NB BOGOR	Analisis Kimia	Analisis Kimia	Analisis Kimia	Analisis Kimia	Analisis Kimia
		Farmasi	Farmasi	Farmasi	Farmasi	Farmasi
				Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)	PPLG	PPLG
3	SMK NB JAMPANG	Teknik Komputer dan Jaringan	Teknik Komputer dan Jaringan	Teknik Komputer dan Jaringan	Teknik Komputer dan Jaringan	Teknik Komputer dan Jaringan
		Teknik Bisnis Sepeda Motor	Teknik Bisnis Sepeda Motor	Teknik Bisnis Sepeda Motor	Teknik Bisnis Sepeda Motor	Teknik Bisnis Sepeda Motor
		Bisnis Daring dan Pemasaran	Bisnis Daring dan Pemasaran	Bisnis Daring dan Pemasaran	Bisnis Daring dan Pemasaran	Bisnis Daring dan Pemasaran
					Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran
					Perbankan	Perbankan

					Syariah	Syariah
4	SMK JBS TEMANGGUNG	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	Teknik Kendaraan Ringan	Teknik Kendaraan Ringan
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	Teknik Sepeda Motor	Teknik Sepeda Motor	Teknik Sepeda Motor
		Rekayasa Perangkat Lunak	Rekayasa Perangkat Lunak	Rekayasa Perangkat Lunak	Rekayasa Perangkat Lunak	Rekayasa Perangkat Lunak

Perkembangan program studi di UNB sejak tahun 2006 tidak ada, terakhir pembukaan **Program Diploma Dua (D2) Penyuluhan Kehutanan** pada tahun 2006, dan pada tahun 2011 peningkatan menjadi Program Diploma Tiga (D3) Penyuluhan Kehutanan.

SMK-AK Nusa Bangsa pada tahun ajaran 2022/2023 membuka jurusan **Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**, kemudian pada tahun ajaran 2023/2024 sesuai spektrum kurikulum baru jurusan RPL berubah menjadi jurusan **Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)**. SMK Nusa Bangsa Jampang pada tahun ajaran 2023/2024 membuka tiga jurusan baru yakni **Bisnis Daring dan Pemasaran, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, dan Perbankan Syariah**. Sedangkan SMK JBS Temanggung tidak ada perkembangan jurusan selama lima tahun terakhir. Berikut gambaran jumlah siswa/mahasiswa dari tahun 2020/2021 s.d 2024/2025.

2.2.1. Universitas Nusa Bangsa (UNB) Bogor

Tabel 2.2. Penerimaan Jumlah Mahasiswa UNB Tahun 2020/2021 – 2024/2025 1

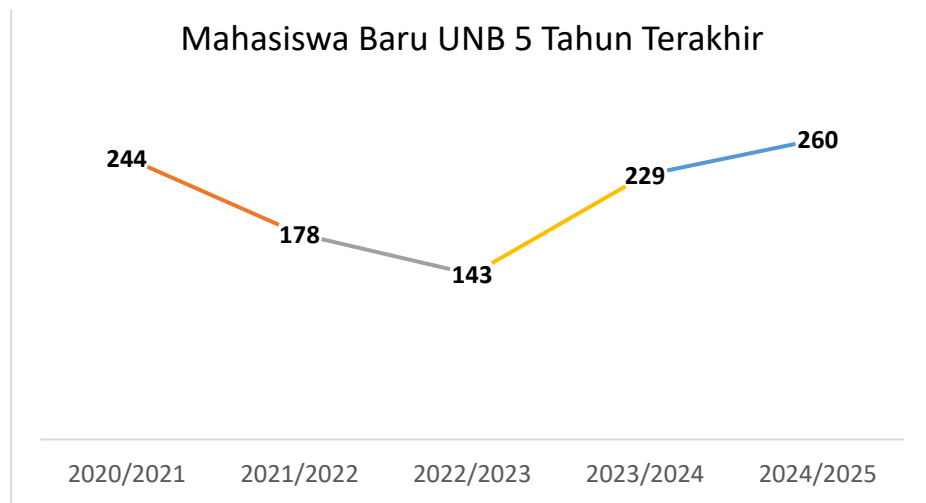
No	Universitas Nusa Bangsa	PENERIMAAN JUMLAH MAHASISWA / SISWA				
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	Agroteknologi	15	12	4	15	14
	Reguler	6	4	2	4	4
	Ekstensi	7	4	1	3	2
	KIP	2	4	1	8	8
2	Agribisnis	13	9	8	21	26
	Reguler	5	2	3	4	3
	Ekstensi	6	5	1	2	2
	KIP	2	2	4	15	21
3	Kimia	82	68	47	44	35
	Reguler	9	4	2	2	6
	Ekstensi	73	63	43	38	17
	KIP	-	1	2	4	12
4	Biologi	7	6	3	6	7
	Reguler	1	3	1	-	-
	Ekstensi	5	3	-	-	1
	KIP	1	-	2	6	6

5	Akuntansi	15	9	11	23	22
	Reguler	2	4	2	-	-
	Ekstensi	11	4	4	3	2
	KIP	2	1	5	20	20
6	Manajemen	32	25	23	53	81
	Reguler	11	9	8	1	4
	Ekstensi	17	13	8	6	7
	KIP	4	3	7	46	70
7	Kehutanan	72	45	42	65	62
	Reguler	37	18	13	15	9
	Ekstensi	31	22	22	18	22
	KIP	6	5	7	32	31
8	Penyuluhan Kehutanan	4	-	-	-	-
	Reguler	4	-	-	-	-
	Ekstensi	-	-	-	-	-
	KIP	-	-	-	-	-
9	Magister Ekonomi Pembangunan	2	4	5	2	13
	Jumlah	244	178	143	229	260
	Reguler	75	44	31	26	26
	Ekstensi	150	114	79	70	53
	Beasiswa KIP	17	16	28	131	168
	Magister	2	4	5	2	13

UNB saat ini memiliki 4 Fakultas, 8 Prodi, dan 1 Program Pasca Sarjana. Pengelompokan pembiayaan mahasiswa UNB terdiri tiga kelas, yakni kelas reguler, karyawan (ekstensi) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perkembangan jumlah mahasiswa program sarjana pada lima tahun terakhir untuk kelas reguler dan kelas karyawan mengalami penurunan yang sangat signifikan, sedangkan mahasiswa KIP dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Program KIP mampu menaikkan jumlah mahasiswa yang semula pada tahun 2022/2023 sebanyak 28 orang menjadi 168 orang pada tahun 2024/2025, yang menyebar ke semua prodi sesuai pilihan mahasiswa yang bersangkutan. Kondisi terendah jumlah mahasiswa terjadi pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 143 orang, tanpa adanya program KIP jumlah mahasiswa kurang dari 100 orang.

Penerimaan mahasiswa baru UNB selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 1.054 orang atau rata-rata per tahun 211 orang. Sejak tahun ajaran 2020/2021 hingga tahun ajaran 2022/2023 mengalami penurunan. Untuk mengatasi kondisi ini sejak tahun ajaran 2023/2024 diambil langkah untuk mendapatkan program beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Aspirasi, sehingga dua tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah mahasiswa, sebagaimana tergambar pada *Gambar 2.1*.

Gambar 2.1. Perkembangan Mahasiswa UNB TA 2020/2021 – 2024/2025 1

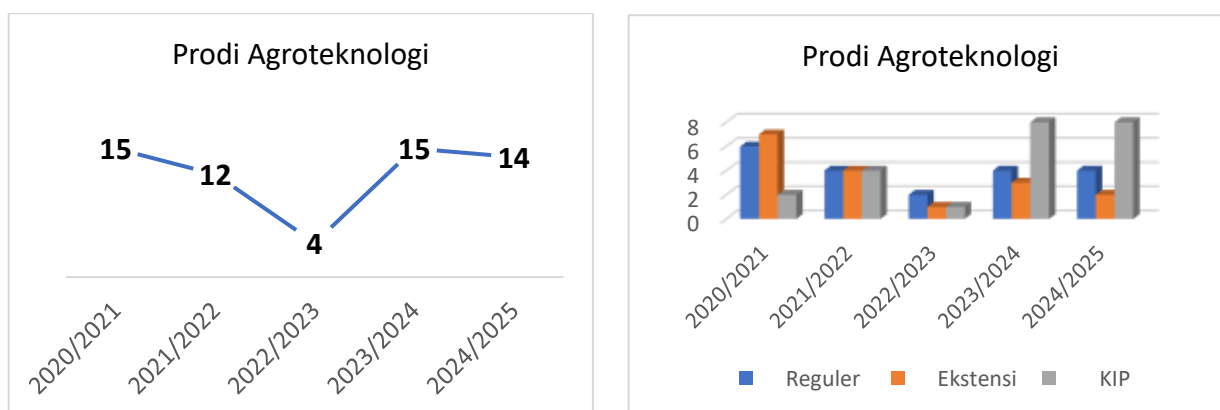


Secara matematis dengan jumlah mahasiswa 260 orang belum mampu memenuhi kebutuhan biaya operasional rutin selama satu tahun, apalagi untuk pengembangan kelembagaan. Secara garis besar jumlah penerimaan mahasiswa baru tidak boleh kurang dari 300 orang.

Gambaran Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Setiap Program Studi.

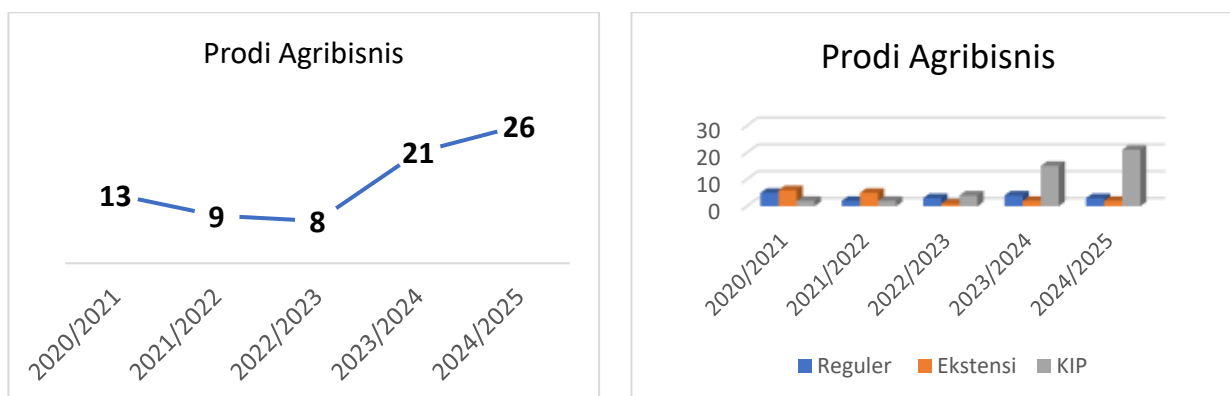
Perkembangan jumlah mahasiswa baru masing-masing prodi selama 5 (lima) tahun terakhir akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Agroteknologi 1



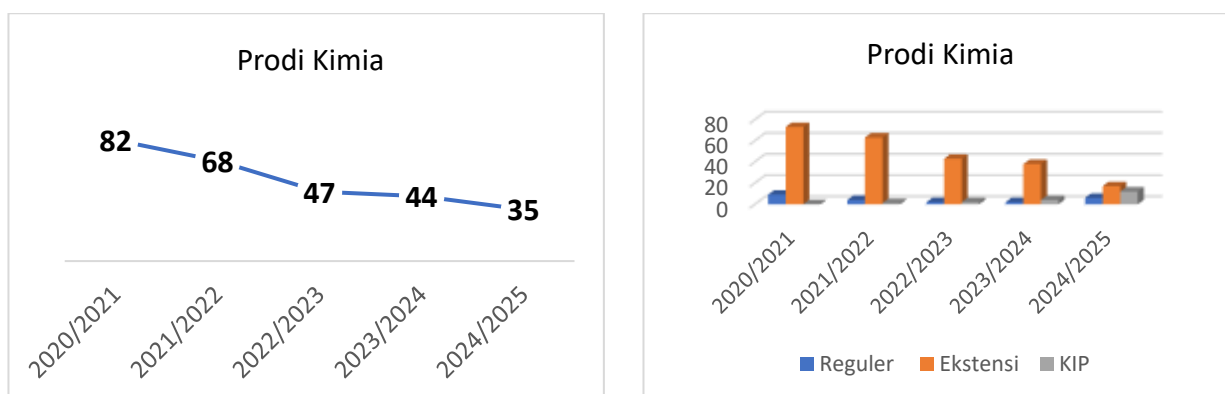
Tahun 2022/2023 terjadi penurunan secara drastis jumlah mahasiswa baru pada prodi Agroteknologi yang semula di atas 10 orang menjadi hanya 4 orang, tetapi dengan adanya program KIP terjadi kenaikan menjadi 14 orang pada tahun 2024/2025.

Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Agribisnis 1



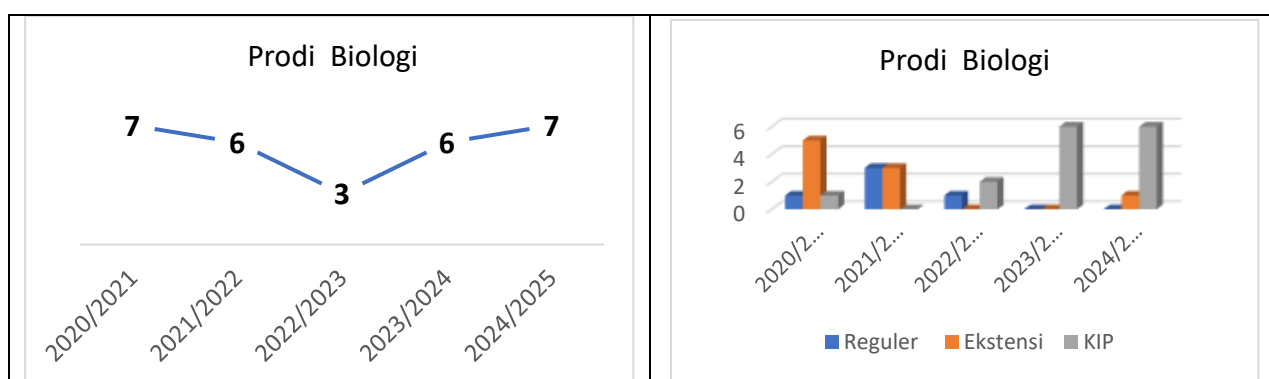
Tahun 2022/2023 terjadi penurunan secara drastis jumlah mahasiswa baru pada prodi Agribisnis yang semula di atas 8 orang menjadi hanya 8 orang, tetapi dengan adanya program KIP terjadi kenaikan menjadi 26 orang pada tahun 2024/2025.

Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Kimia 1



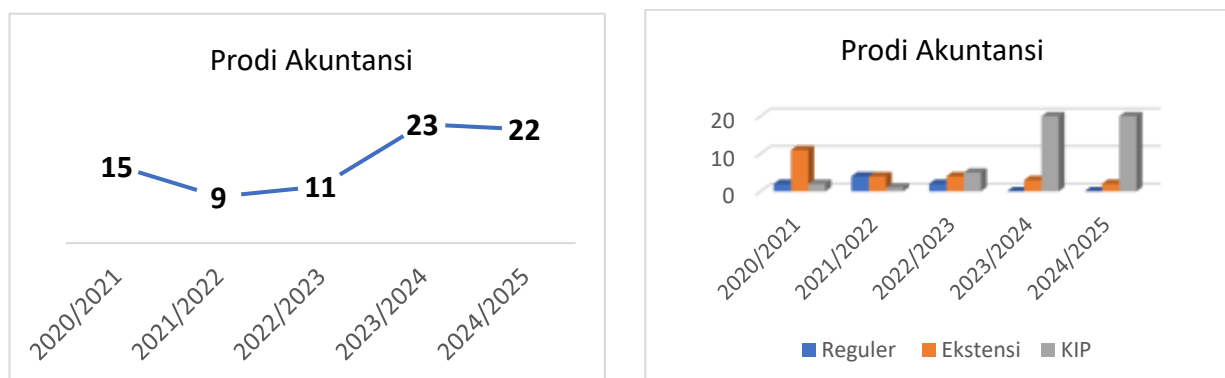
Gambar 2.4. menunjukkan terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru pada prodi Kimia dari 82 orang pada tahun 2021/2022 menjadi 35 orang pada tahun 2024/2025. Hal ini disebabkan turunnya minat mahasiswa menggunakan KIP pada prodi tersebut. Selain itu sarana prasarana pada prodi Kimia tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi saat ini.

Gambar 2.5. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Biologi 1



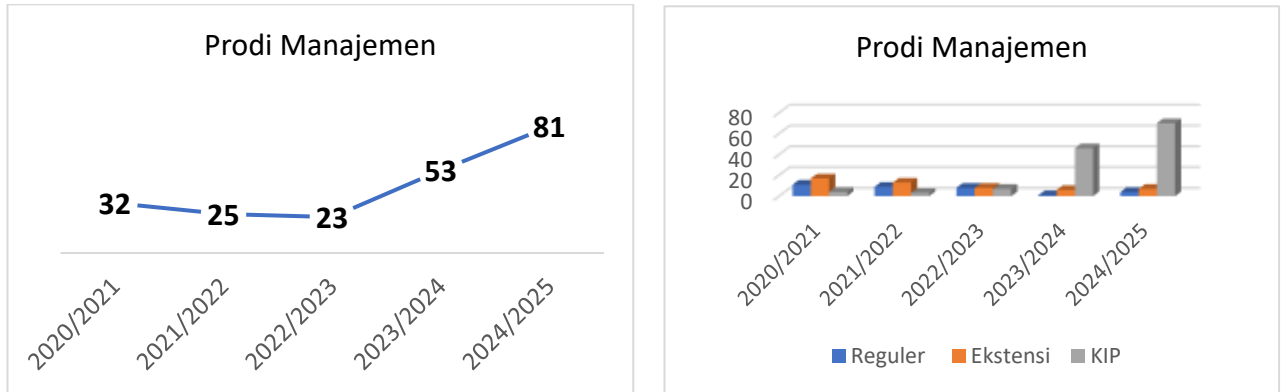
Tahun 2022/2023 di UNB terjadi pertama kali penurunan jumlah mahasiswa baru pada prodi Biologi sejumlah 3 orang, walaupun adanya program KIP tetap tidak terjadi kenaikan sesuai yang diharapkan.

Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Akuntansi 1



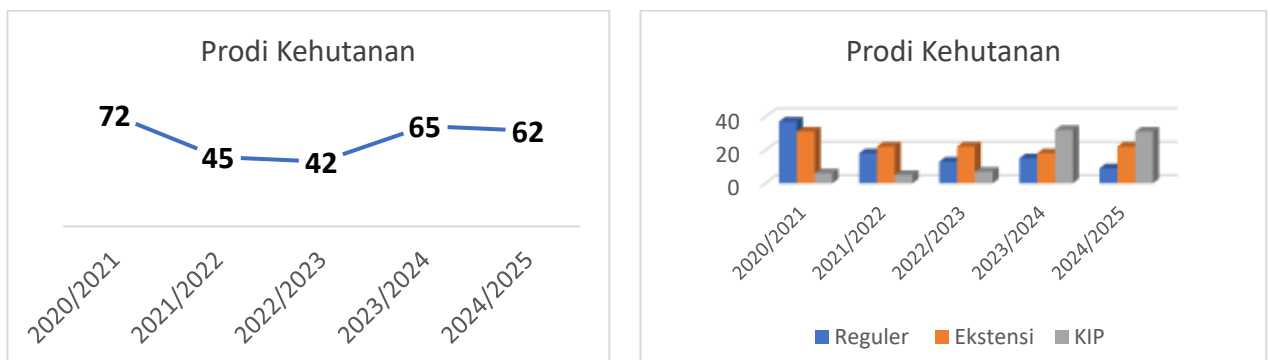
Gambar 2.6. menunjukkan terjadi kenaikan jumlah mahasiswa baru pada prodi Akuntansi dari 11 orang pada tahun 2022/2023 menjadi 22 orang pada tahun 2024/2025. Hal ini didukung oleh akreditasi Baik Sekali.

Gambar 2.7. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Manajemen 1



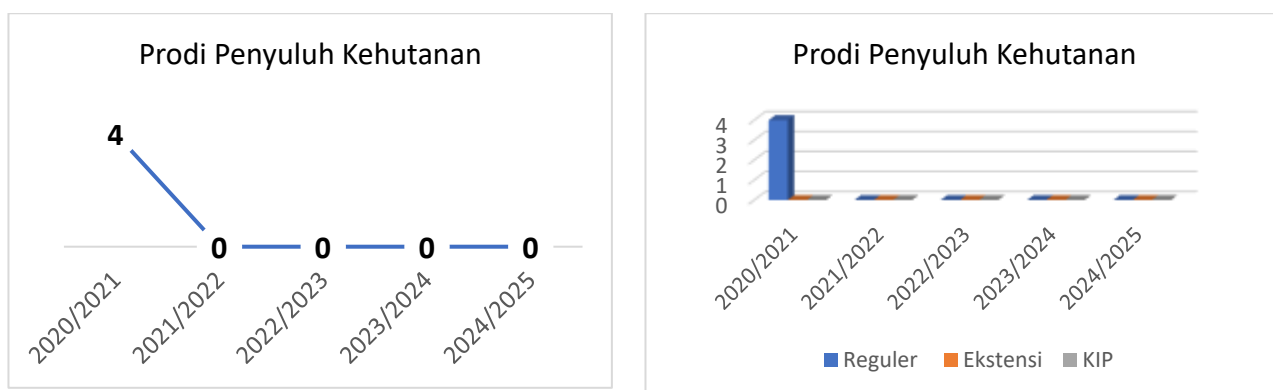
Gambar 2.7. menunjukkan pada prodi Manajemen pada tahun 2020/2021 sampai dengan 2022/2023 terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru, dengan adanya KIP terjadi kenaikan signifikan sebesar 30 orang (230%) dari tahun 2022/2023 dan menjadi 81 orang 352% pada tahun 2024/2025.

Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Kehutanan 1



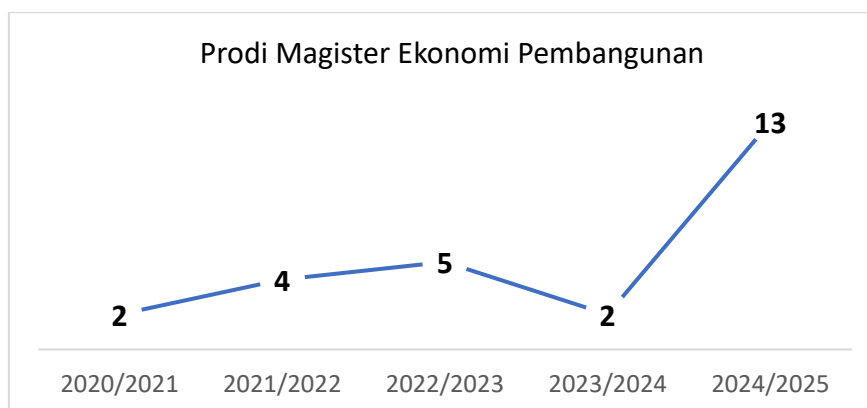
Gambar 2.8. menunjukkan bahwa prodi kehutanan jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun relatif stabil. Tahun 2021/2022 terjadi penurunan 37,5% dari tahun 2020/2021. Tahun 2022/2023 terjadi penurunan 41,66% jika dibandingkan 2020/2021. Tahun 2023/2024 terjadi kenaikan 154,76% dari tahun 2022/2023 dan tahun 2024/2025 terjadi kenaikan 147,61% dibandingkan 2022/2023.

Gambar 2.9. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Penyuluh Kehutanan 1



Prodi Penyuluh kehutanan merupakan satu-satunya program Diploma III yang ada di UNB. Prodi ini dibentuk karena adanya kerja sama dengan Kementerian Kehutanan (Permenpan No.27 Tahun 2013) untuk memenuhi kebutuhan penyuluh kehutanan. Dalam perjalanannya sejak tahun 2021/2022 sampai dengan sekarang tidak ada lagi mahasiswa baru. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus maka akan mempengaruhi akreditasi Fakultas Kehutanan. Yayasan harus mengambil sikap menui program studi atau mengganti dengan program studi yang dibutuhkan dan diminati masyarakat.

Gambar 2.10. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru Prodi Magister Ekonomi Pembangunan 1



Program Pasca Sarjana tidak ada perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun dan jumlah mahasiswa paling rendah pada tahun ajaran 2023/2024. Pada tahun 2023/2024 tidak ada mahasiswa yang mendaftar, sedangkan pada saat itu tengah dilakukan penilaian akreditasi Program Pasca Sarjana. Untuk mengatasi kekosongan mahasiswa, Ketua Yayasan memberikan tugas belajar kepada 2 (dua) orang staf (UNB dan SMK NB). Langkah ini ditempuh dalam rangka penilaian akreditasi Program Pasca Sarjana UNB. Salah satu kurangnya minat calon mahasiswa dikarenakan akreditasinya C, yang lulusannya tidak dapat disesuaikan ijazahnya bagi mahasiswa pegawai Pemerintah. Setelah terjadi peningkatan akreditasi di C

(Cukup) menjadi Baik Sekali terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan, yang semula 2 (dua) orang menjadi 13 orang.

2.2.2. SMK AK Nusa Bangsa

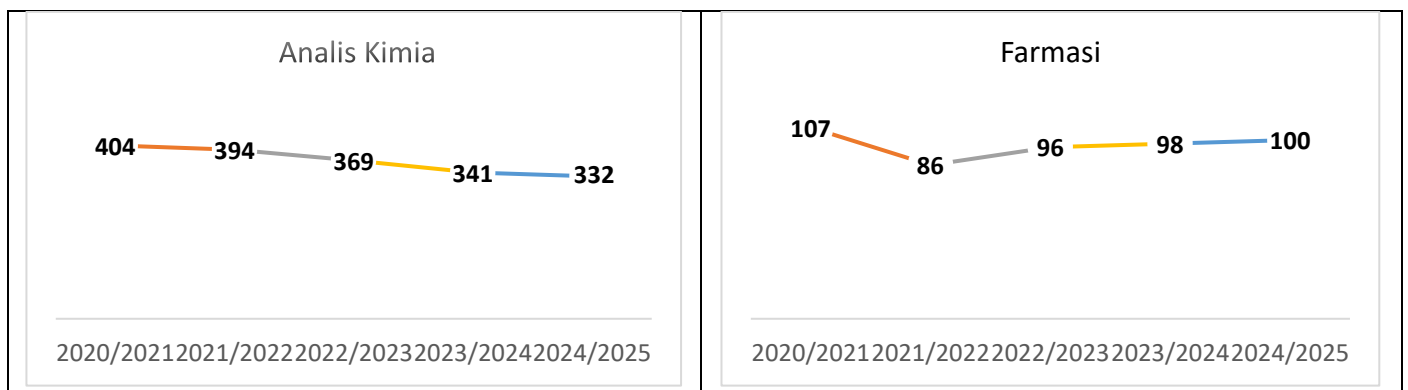
SMK AK Nusa Bangsa memiliki 3 jurusan yaitu Analis Kimia, Farmasi, dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang dalam perjalannya berubah namanya menjadi Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG). Perkembangan jumlah siswa lima tahun terakhir untuk jurusan Analis Kimia mengalami penurunan. Sedangkan jurusan Farmasi relatif tetap.

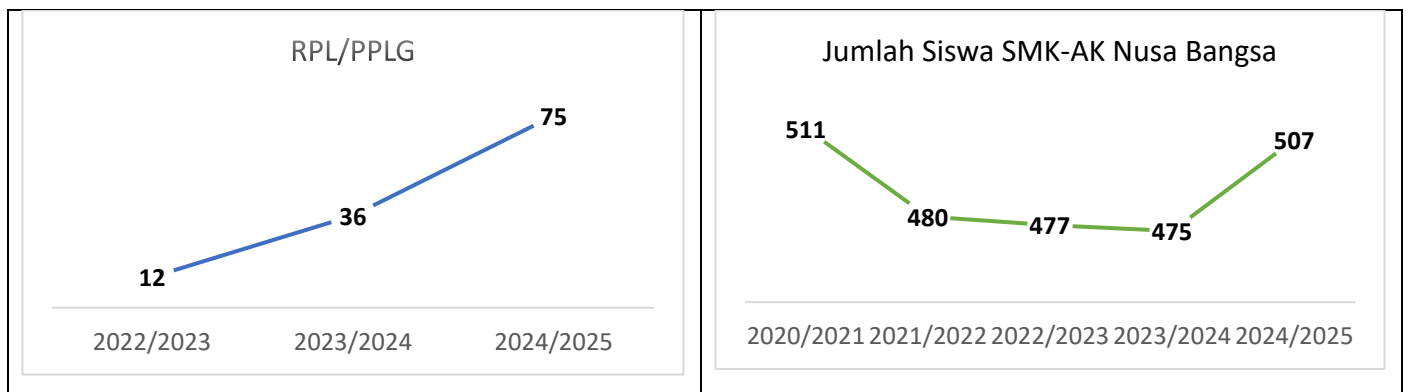
SMK_AK melihat tanda-tanda kejenuhan pada jurusan analis kimia dan farmasi yang selama ini menjadi ikon Yayasan. Apabila tren penurunan ini tidak diantisipasi, dikhawatirkan jumlah siswa baru akan semakin menurun. Oleh karena itu pada tahun ajaran 2022/2023 membuka jurusan baru Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG). Pada saat awal pembukaan jurusan jumlah siswanya hanya 12 orang, mungkin publikasinya belum progresif. Pada tahun ajaran 2023/2024 **mengalami kenaikan jumlah siswa sebanyak 36 orang atau 300%, dan tahun ajaran 2024/2025 mengalami kenaikan eksponensial sebesar 625%** jika dibandingkan saat awal pembukaan jurusan.

Fenomena ini memberikan pembelajaran adanya pergeseran peminatan generasi milenial yang mengarah kepada teknologi informatika. Langkah terobosan SMK-AK patut diberi apresiasi, dan patut dicontoh oleh pimpinan unit kegiatan yang lain.

Untuk melihat perkembangan jumlah siswa baru selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.11. Perkembangan Siswa SMK-AK Nusa Bangsa Per Jurusan TA 2020/2021 – 2024/2025 1





Perkembangan lain dari SMK-Ak Nusa Bangsa adalah tercapainya prestasi non-akademik pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.3. Prestasi Non Akademik yang dicapai oleh SMK AK Nusa Bangsa Tahun 2023 dan 2024 1

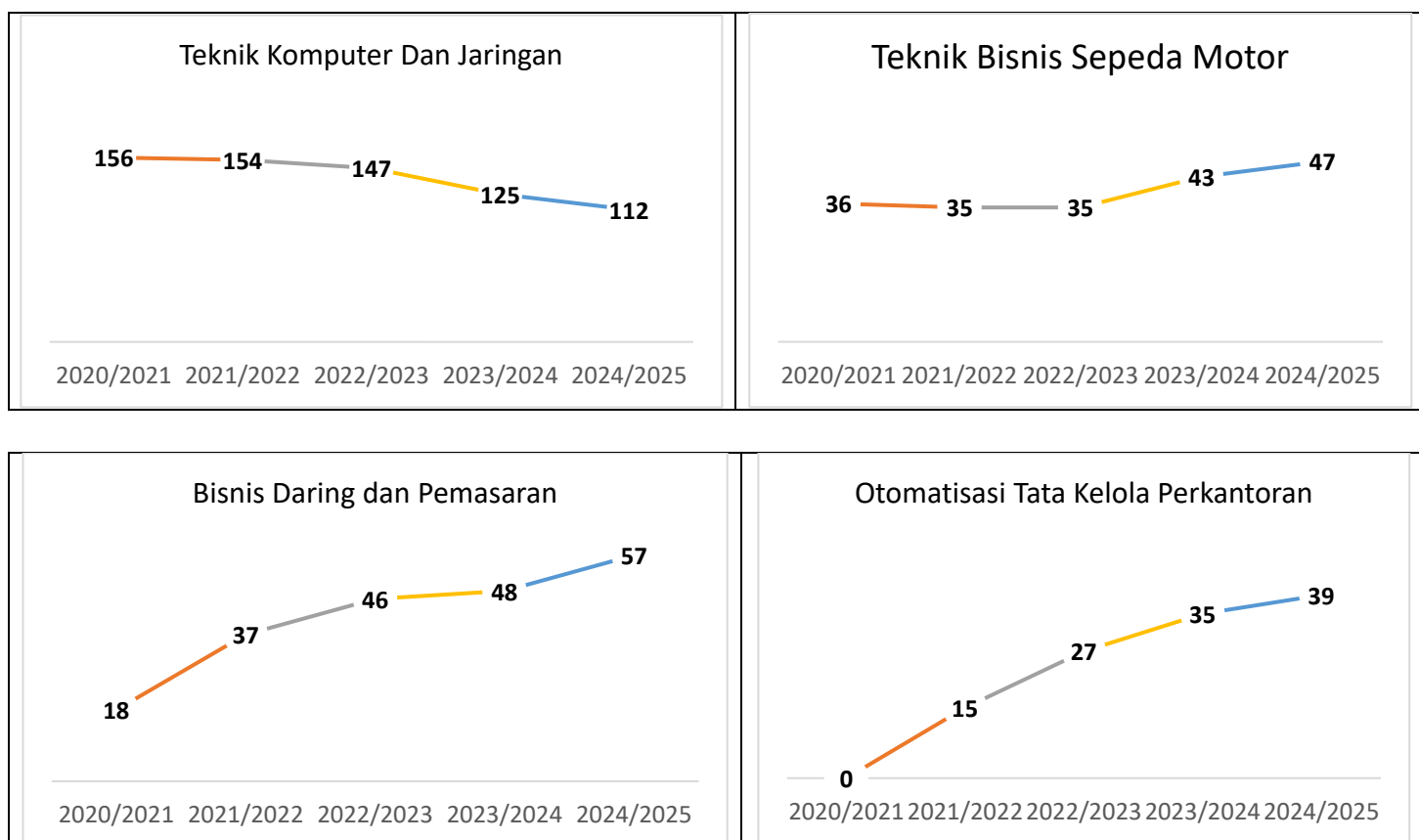
No.	Peraih prestasi	Jenis prestasi
1.	Zahra Nurul Rizkyah	Juara 2 Nasional SHIMESCO UIN Jakarta Tahun 2023 Poster Public "Mari cegah stunting dengan konsumsi lele bubur (lebur)
2.	Zahra Nurul Rizkiyah	Juara 2 Nasional LKTI Food Energing Festival ITB, tahun 2023. "Cent drink Inovasi Sediaan Eferfescent berbasis tempe guna mengatasi Krisis Nutrisi pada Remaja"
3.	Zahra Nurul Rizkiyah	Juara 1 Nasional Chemistry Fun Day UNPAD2023. "Koliden : Inovasi Rodentisida Nabati berbasis Kulit Jengkol (Phitecellobium Jiringa) dan Daun Ketapang (Terminalia Catappa L)"
4.	Zara Nurul Rizkiyah	Juara 1 Nasional LKIP Pesta Sains Nasional Universitas IPB tahun 2023 "Soyber : Inovasi of Snack Bar as Prebiotic source from Tempa to maintain The Digestive System
5.	Azka Atma Ken Muhamad	Juara 3 Marawis, Nusa Bangsa Competition. Universitas Nusa Bangsa tahun 2023.
6.	Sharla Natania Aisyah Rahman	Juara 3 Nasional Lomba Karya Ilmiah Populer Pesta Sains Nasional, Universitas IPB tahun 2024 "Meatifity : Inovasi daging analog Sumber Protein berbasis Tempe dan Kacang Merah sebagai Upaya Diversifikasi Pangan Nabati"
7.	Sharla Yesi Sawitri Zahra Nurul Rizkiyah	Juara 2 Lomba Karya Ilmiah Chemistry Fun Daays UNPAD, tahun 2024. "Potensi Kitosan Limbah Cangkang Keong Sawah sebagai Alternatif Bahan Dasar Cangkang Kapsul Obat Ramah Lingkungan "

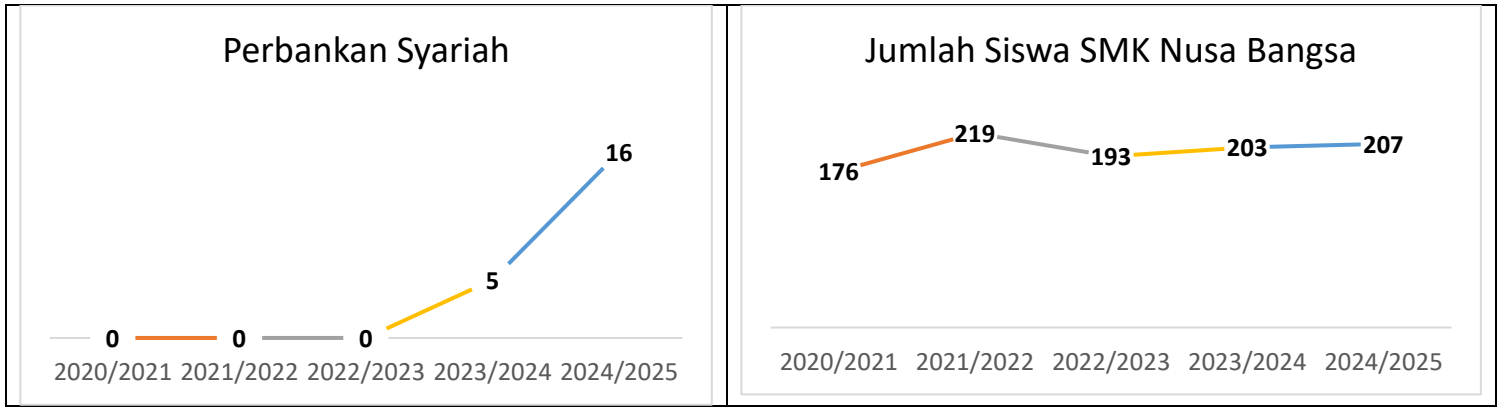
8.	Tiara Raswati	Juara Harapan 2 Duta Genre Kota Bogor tahun 2024.
9.	Iska Setya Ati	Juara 3, Medali Perunggu Prestasi Kejuaraan IPSC 4 Pencak Silat Tingkat Nasional Kategori Tanding Putri penyelenggara IPSI dan Kemenpora.

2.2.3. SMK Nusa Bangsa Jampang

SMK Nusa Bangsa Jampang dengan 5 jurusan yakni jurusan **Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Bisnis Daring dan Pemasaran, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, dan Perbankan Syariah**. Tiga jurusan terakhir baru dibuka pada tahun ajaran 2020/2021 dan baru jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran yang ada siswanya. Tahun ajaran 2021/2022 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran baru ada siswanya, dan terakhir tahun ajaran 2023/2024 jurusan Perbankan Syariah baru ada siswanya. Perkembangan jumlah siswa dalam lima tahun terakhir secara keseluruhan mengalami kenaikan, khusus jurusan Teknik Komputer dan Jaringan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan siswa.

Gambar 2.12. Perkembangan Siswa SMK Nusa Bangsa Jampang Per Prodi TA 2020/2021 – 2024/2025 1

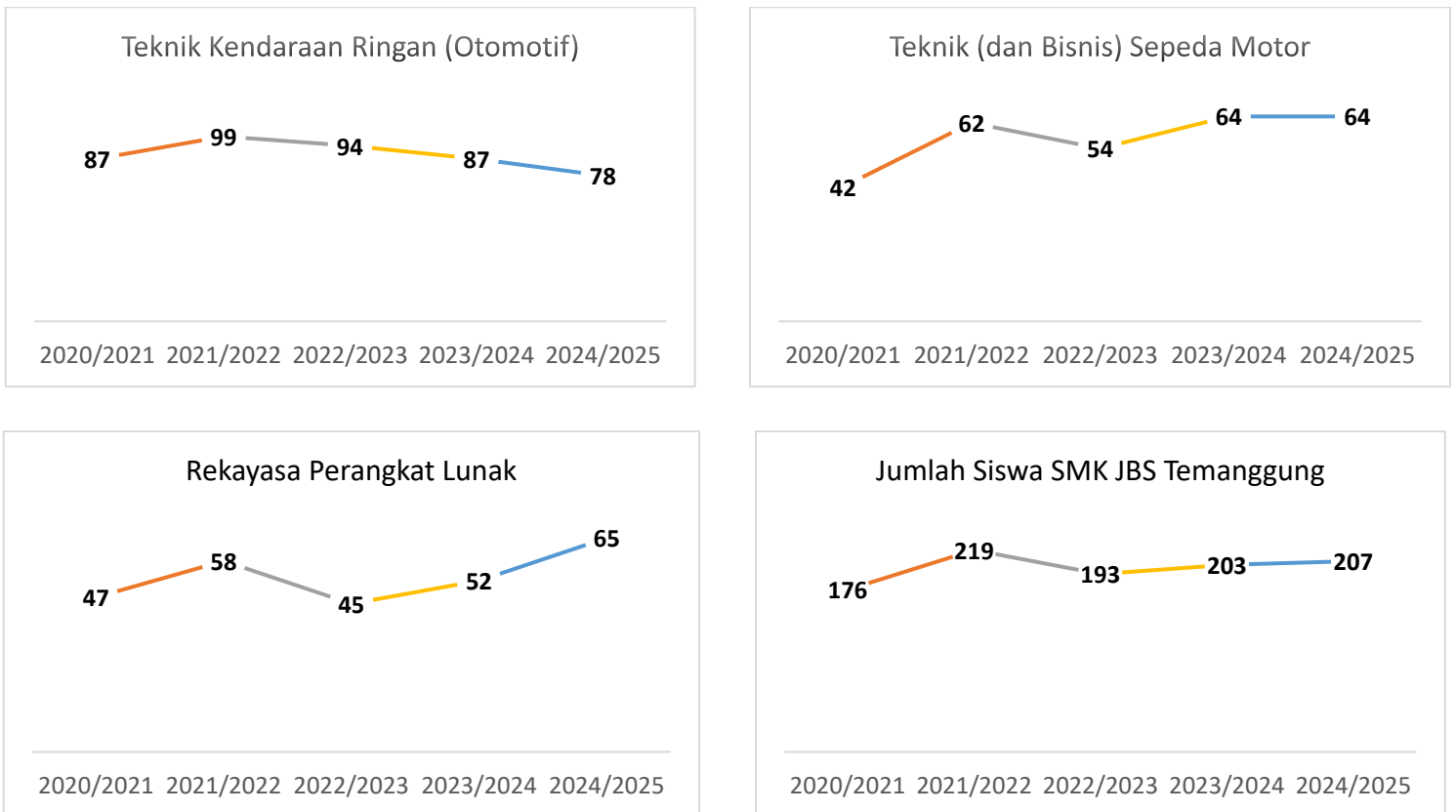




2.2.4. SMK Jenderal Bambang Sugeng

SMK Jenderal Bambang Sugeng Temanggung dengan tiga jurusan yaitu Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Perkembangan jumlah siswa selama lima tahun terakhir fluktuatif, dan dua tahun terakhir mengalami kenaikan namun kecil.

Gambar 2.13. Perkembangan Siswa SMK JBS Temanggung Per Prodi TA 2020/2021 – 2024/2025 1



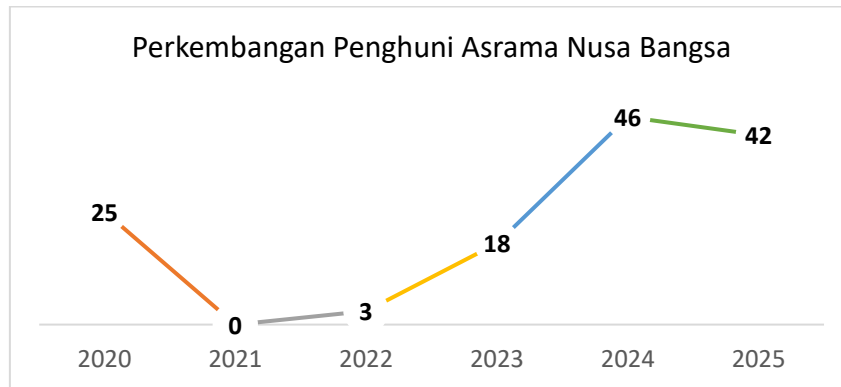
2.2.5. Wisma Griya Nusa Bangsa

Pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022/2023 dan 2023/2024 telah dilakukan pembangunan Griya Nusa Bangsa sedemikian, sehingga saat ini

lebih layak untuk dijadikan kantor, ruang rapat, ruang pertemuan dan kamar-kamar untuk tempat menginap, berupa kamar hotel maupun kamar asrama mahasiswa.

Berikut data penghuni Asrama Nusa Bangsa dari tahun 2020 – 2025 seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar 2.14. Perkembangan Penghuni Asrama Nusa Bangsa Tahun 2020 –2025 1



Gambar 2.15. Perkembangan Penyewa Wisma GNB Tahun 2020 –2025 1



Keterangan :

1. Kamar biasa adalah kamar sebelum direnovasi menjadi hotel, disewakan untuk acara pelatihan satpam atau acara lain.
2. Tahun 2021 dan 2022 penyewa kamar biasa tinggi didominasi oleh pelatihan satpam rutin setiap bulan dan acara himpunan mahasiswa.
3. Tahun 2023 kamar biasa menjadi hotel sehingga pelatihan satpam tidak lagi menyewa di GNB karena harga sewa tidak sesuai dengan standar mereka
4. Tahun 2023 penyewa kamar hotel meningkat karena kamar relatif sudah tertata baik.
5. Tahun 2025 didominasi sewa kamar 1 bulan sebanyak 7 kamar oleh mahasiswa magang di clinic wocare dekat dengan GNB
6. Penurunan jumlah penyewa aula karena harga jual yang naik (sebelumnya Rp 3.000.000 menjadi Rp 5.000.000) sehingga para penyewa memilih Gedung lain yang jauh lebih murah (info : para penyewa berpindah sewa ke gor padjajaran seharga Rp 1.500.000)

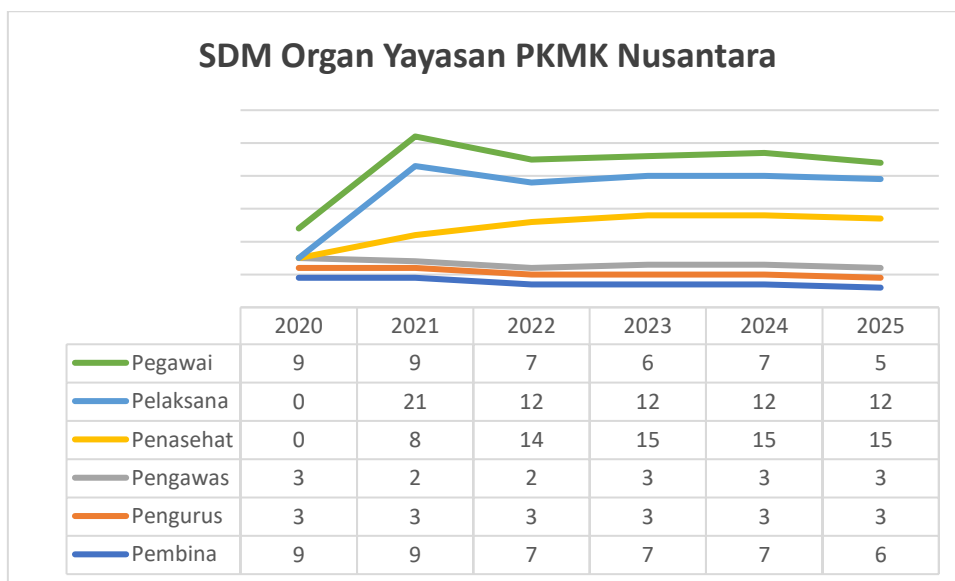
2.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Yayasan merujuk pada pengelolaan dan pengembangan Yayasan PKMK Nusantara, terdiri dari SDM Yayasan dan SDM Unit-unit.

2.3.1. SDM Yayasan

SDM Yayasan PKMK Nusantara terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, Penasehat, Pelaksana dan Pegawai. Pelaksana kegiatan dan Penasehat Pengurus, baru baru dibentuk pada kepengurusan periode 2021 – 2025, seperti tergambar pada *Gambar 2.7.* berikut.

Gambar 2.16. Perkembangan SDM Organ Yayasan Tahun 2020 –2025 1



Pada grafik 2.7. tergambar bahwa anggota Pembina Berkurang 3 orang dikarenakan satu orang mengundurkan diri dan 2 orang meninggal. Pengurus dan Pengawas sama-sama 3 orang, kecuali pada tahun 2021 dan 2022 anggota pengawas hanya 2 orang karena satu orang mengundurkan diri.

2.3.2. SDM Unit Kegiatan.

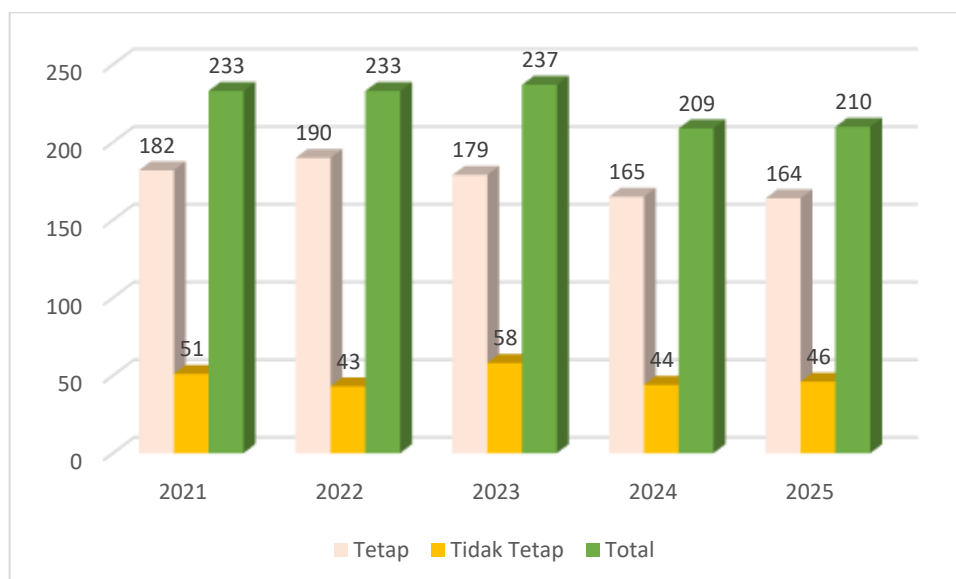
Tabel 2.4. Pegawai di Lingkungan Yayasan 2020/2021– 2024/2025 1

No.	TAHUN	PEGAWAI UNIT									
		UNB		SMK-AK		SMK NB		SMK-JBS		GNB	
		T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT
1	2021	120	4	42	13	6	19	7	12	7	3
2	2022	125	2	45	7	6	20	7	13	7	1
3	2023	121	5	41	7	6	26	6	18	5	2
4	2024	104	2	42	6	6	24	9	11	4	1
5	2025	103	0	41	7	7	23	9	15	4	1

T = Tetap, TT = Tidak Tetap

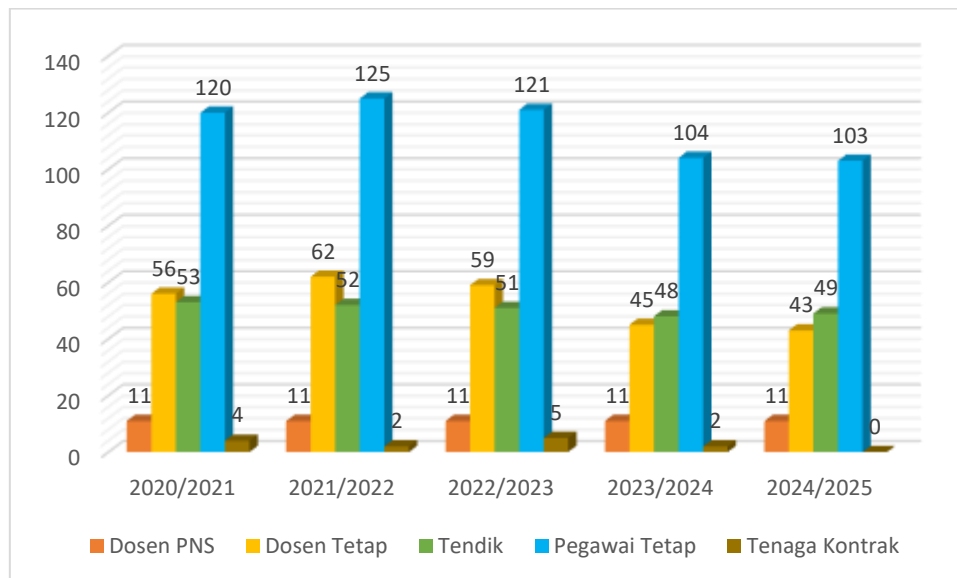
Jumlah pegawai pada Unit Kegiatan, baik pegawai Tetap (T) maupun pegawai Tidak Tetap (TT) jumlahnya mengalami penurunan. Bahkan di UNB pada tahun 2025 sudah tidak ada pegawai Tidak Tetap. Pegawai yang terjadi penambahan pada Unit SMK-NB maupun SMK JBS hal ini karena bertambahnya siswa.

Gambar 2.17. Perkembangan Pegawai Yayasan Tahun 2021 –2025 1



Gambar 2.18 menggambarkan bahwa dosen tetap dan tendik di UNB sama-sama berkurang, dosen tetap pada t.a. 2020/2021 sebanyak 56 orang, sedangkan pada t.a. 2024/2025 sebanyak 43 orang. Demikian halnya dengan tendik yang semula 53 orang menjadi 49 orang. Yang mengawatirkan terjadinya pengunduran diri du orang dosen yang terjadi pada ta 2024/2025.

Gambar 2.18. Perkembangan Pegawai UNB Tahun 2020/2021 – 2024/2025 1



2.4. Aset Yayasan

Aset Yayasan terdiri dari aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Yayasan, sedangkan Aset bergerak berupa mobil dan sepeda motor yang digunakan untuk operasional.

2.4.1. Aset Tidak Bergerak.

Aset tidak bergerak berupa bidang tanah yang dikuasai Yayasan berjumlah 10 (sepuluh) bidang seluas 48.587 m², tersebar di 5 lokasi. Legalisasi aset Yayasan yang semula hanya 3 (tiga) bidang tanah wakaf yang sudah bersertipikat atas nama Yayasan, saat ini bertambah 3 bidang bersertipikat HGB atas nama Yayasan yaitu 2 (dua) bidang di UNB dan satu bidang SMK Jampang Kabupaten Bogor.

SMK-AK dan Wisma Griya Nusa Bangsa hanya selesai sampai keluar SK. Pemberian HGB Nomor:133/HGB/ BPN-10.09/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.

Pengganti tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan Tol sudah diganti menjadi tanah wakaf kembali tersebar di dua tempat yaitu berupa kolam di belakang kampus UNB seluas 4.831 m² dan Tanah dan Bangunan Rumah tinggal di Jalan Pelita Jaya III No.5 Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor seluas 535 m².

Tabel 2.5. Kondisi Aset Tanah Yayasan Tahun 2025 1

No	LOKASI	STATUS TANAH		
		LUAS (m ²)	JML. BIDANG	KETERANGAN
1.	UNIVERSITAS NUSA BANGSA (UNB)	23.455	6	a. Kampus seluas 17.725 m ² , terdiri dari: 1) Tanah Milik Wakaf 3 bidang: 5.745 m ² 2) HGB 2 bidang seluas 5.746 m ² dan 703 m ² 3) Tanah Pengganti Wakaf seluas 4.831 m ² dalam proses permohonan sertipikat
				b. Milik Adat/girik 1 (satu) bidang seluas 700 m ² dalam proses permohonan sertipikat.
				c. Kebun Percobaan (AJB) 1 (satu) bidang seluas 5.730 m ²
2.	SMK-ANALIS KIMIA dan GNB	17.310	1	SK. Pemberian HGB Nomor:133/HGB/ BPN-10.09/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023
3.	SMK NUSA BANGSA JAMPANG	7.187	1	Sertipikat HGB
4.	SMK JBS TEMANGGUNG	1.500	1	a. Sewa Dari Pemda Dan PT KAI seluas 3.102 m ²
				b. Wakaf seluas 1.500 m ²
5.	Tanah dan Bangunan Rumah tinggal di Jalan Pelita Jaya III No.5 Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor	535	1	Pengganti Tanah Wakaf dalam proses permohonan sertipikat
JUMLAH		48.587	10	

2.4.2. Sarana dan Prasarana

Mengingat banyaknya data sarana dan prasarana maka tidak diurai secara rinci tetapi bisa dilihat pada daftar lampiran.

2.4.3. Aset Bergerak

Tabel 2.6. Perkembangan Aset Kendaraan Tahun 2021 - 2025 1

No	SEKOLAH	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi
		Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	
1	UNB	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	BAIK
2	SMK-AK	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	BAIK
3	SMK-JBS	2	1	2	1	3	1	3	1	3	1	BAIK
4	SMK-NB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	GNB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kondisi aset bergerak Yayasan berada di unit kegiatan UNB, SMK-AK dan SMK-JBS, sedangkan SMK NB Jampang dan Wisma GNB belum memiliki kendaraan. SMK-JBS sejak tahun 2020 sudah tersedia 2 (dua) unit mobil, Tahun 2023 mobil praktek bertambah 1 sehingga jumlahnya menjadi 3 unit, satu digunakan operasional dan 2 (dua) digunakan untuk praktek siswa, saat ini sepeda motor yang tersedia 1 unit.

BAB III KONDISI KEUANGAN

Sumber keuangan yayasan terdiri dari iuran pengembangan Unit kegiatan, penyewaan Aula, penyewaan asrama, dan penyewaan hotel. Untuk melihat sebaran penerimaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

3.1. Sumber-sumber Keuangan

Tabel 3.1. Sumber-sumber Keuangan Yayasan dan Unit Kegiatan 7

No	UNIT	JENIS	SATUAN	KETERANGAN
1	Yayasan / Griya	Sumbangan Pengembangan Yayasan	60.000.000-300.000.000	Variatif
		Sewa Aula	3.000.000	Per pakai
		Sewa Hotel	200.000	Per malam
		Sewa asrama	600.000 – 1.200.000	Per kamar per bulan
		Sewa Rumah Cimanggu	60.000.000	Per ahun
		Ganti Rugi Tanah		Insidentil
2	UNB	SPP Mhs Reguler	11.000.000	Pertahun
		SPP Mhs Ekstensi	12.000.000	Pertahun
		SPP KIP Skema I	8.000.000	Pertahun
		SPP KIP Skema II	4.800.000	Pertahun
		Magister	16.000.000	Pertahun
		SPS (Uang Gedung)	3.500.000	Non KIP
		Biaya Pendaftaran	150.000	Non KIP
3	SMK AK Nusa Bangsa Bogor	SPP	150.000-400.000	Persiswa/bulan
		Bos Pusat	1.840.000	Persiswa/tahun
		Bos Provinsi	700.000	Persiswa/tahun
		Bantuan Siswa Miskin	1.000.000	Persiswa/tahun
4	SMK Nusa Bangsa Jampang	SPP	150.000 - 200.000	Persiswa/bulan
		Bos Pusat	1.700.000	Persiswa/tahun
		Bos Provinsi	700.000	Persiswa/tahun
5	SMK JBS Temanggung	SPP	100.000-120.000	Persiswa/bulan
		Bos Pusat	321.408.000-390.420.000	Pertahun
		Bos Provinsi	47.000.000-53.500.000	Pertahun

3.2. Realisasi Keuangan

Penerimaan dan belanja tahun anggaran 2020 merupakan kelanjutan dari pengurus sebelumnya. Untuk melihat penerimaan dan belanja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2020 1

No	Unit	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Yayasan	1.428.006.036	4.316.352.896	4.033.221.000	1.711.137.932
2	Universitas Nusa Bangsa	6.100.147.820	15.288.505.554	15.091.258.644	6.297.394.730
3	SMK AK Nusa Bangsa	1.733.149.358	4.776.724.424	6.104.948.103	404.925.679
4	SMK Nusa Bangsa	308.611.894	927.047.779	899.406.013	336.253.660
5	SMK JBS Temanggung	381.050.793	995.801.408	872.338.173	504.514.028
	J U M L A H	9.950.965.901	26.304.432.061	27.001.171.933	9.254.226.029

Pada tahun 2020 realisasi belanja yang melebihi pendapatan hanya SMK AK NB yakni sebesar Rp.1.328.223.679, sedangkan yang lainnya surplus.

Penerimaan dan belanja tahun anggaran 2021 disusun oleh pengurus periode 2021-2025. Untuk melihat penerimaan dan belanja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2021 1

No	Unit	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Yayasan	1.711.137.932	1.312.984.952	1.683.043.238	1.341.079.646
2	Universitas Nusa Bangsa	6.297.394.730	15.206.161.435	17.669.576.307	3.833.979.858
3	SMK AK Nusa Bangsa	404.925.697	5.535.161.548	5.176.982.102	763.105.125
4	SMK Nusa Bangsa	336.253.660	1.262.218.357	1.234.913.443	363.558.574
5	SMK JBS Temanggung	504.514.028	1.116.057.501	1.011.712.083	608.859.446
	J U M L A H	9.254.226.029	24.432.583.793	26.776.227.173	6.910.582.649

Pada tahun 2021 realisasi belanja melebihi pendapatan terjadi pada Yayasan dan UNB. Hal ini terjadi karena yayasan melakukan renovasi dan UNB membangun Auditorium.

Penerimaan dan belanja tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 20221

No	Unit	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Yayasan	1.341.079.646	1.792.959.025	2.751.262.359	382.776.312
2	Universitas Nusa Bangsa	3.833.979.858	10.205.249.758	12.059.339.768	1.979.889.848
3	SMK AK Nusa Bangsa	763.105.125	5.897.551.103	6.545.698.647	114.957.581
4	SMK Nusa Bangsa	363.558.574	1.510.335.746	1.646.638.961	227.255.359
5	SMK JBS Temanggung	608.859.446	1.148.597.000	1.352.890.117	404.566.329
	J U M L A H	6.910.582.649	20.554.692.632	24.355.829.852	3.109.445.429

Pada tahun 2022 realisasi belanja melebihi pendapatan terjadi pada Yayasan dan semua unit. Hal ini terjadi karena yayasan melakukan sertifikasi aset dan UNB karena penurunan jumlah siswa, sedangkan Unit SMK karena pengadaan sarana dan peralatan karena pembukaan jurusan baru.

Penerimaan dan belanja tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 20231

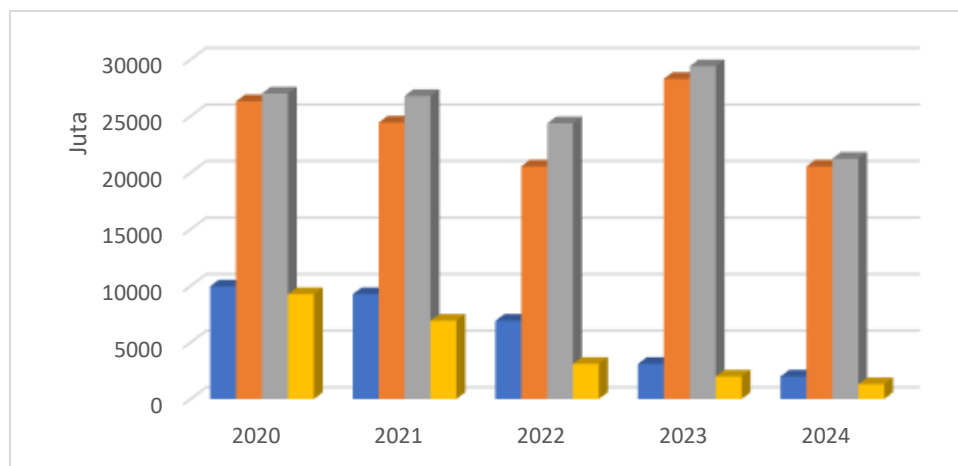
No	Unit	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Yayasan	382.776.312	1.475.538.372	1.390.557.159	467.757.525
2	Universitas Nusa Bangsa	1.979.889.848	10.045.503.873	11.045.072.814	980.320.907
3	SMK AK Nusa Bangsa	114.957.581	5.146.847.506	5.233.147.996	28.657.091
4	SMK Nusa Bangsa	227.255.359	1.527.838.501	1.493.372.578	261.721.282
5	SMK JBS Temanggung	404.566.329	1.133.544.000	1.285.674.315	252.436.014
	J U M L A H	3.109.445.429	19.329.272.252	20.447.824.862	1.990.892.819

Pada tahun 2023 realisasi belanja melebihi pendapatan secara signifikan terjadi pada UNB. Hal ini terjadi karena penerimaan dari mahasiswa belum memadai dari kebutuhan dan banyaknya tunggakan. Penerimaan dan belanja tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024 1

No	Unit	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Yayasan	467.757.525	1.051.351.614	1.208.807.100	310.302.039
2	Universitas Nusa Bangsa	980.320.907	10.574.177.483	10.922.924.334	631.574.056
3	SMK AK Nusa Bangsa	28.657.091	5.852.136.979	5.845.113.662	35.680.408
4	SMK Nusa Bangsa	261.721.282	1.696.140.866	1.824.645.162	133.216.986
5	SMK JBS Temanggung	252.436.014	1.382.371.978	1.433.698.329	201.109.663
	J U M L A H	1.990.892.819	20.556.178.920	21.235.188.587	1.311.883.152

Pada tahun 2024 realisasi belanja melebihi pendapatan terjadi pada Yayasan, UNB, SMK NB dan SMK JBS. Hal ini terjadi karena penerimaan yayasan dari iuran unit mengalami penurunan, SMK NB dan SMK JBS membangun gedung baru, sedangkan UNB penerimaan dari mahasiswa belum mencukupi kebutuhan.



Gambar 3.1. Perkembangan Keuangan Perkembangan Keuangan (Saldo, Pendapatan dan Belanja) Tahun 2020/2021 – 2024/20251

Gambar 3.1. tahun 2020 sampai dengan 2024 pendapatan lebih rendah daripada belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi dalam kondisi tidak sehat, karena tidak seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Kondisi seperti ini di masa mendatang harus segera dicarikan jalan keluarnya, agar keuangan organisasi stabilitasnya terjaga dengan baik.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Visi yang terdapat dalam Renstra 2017 tidak mengalami perubahan karena setelah dikaji ulang masih cukup relevan untuk dituangkan dalam Renstra Tahun 2021-2025, dengan titik beratnya masih sama, yaitu ingin menjadikan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan yang profesional, dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Pengurus Periode Tahun 2021-2025, telah melakukan berbagai kajian baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menemukenali kondisi awal Yayasan pada saat pergantian Pengurus, selanjutnya memformulasikan rumusan misi yang tepat.

Pada saat menetapkan Visi, Misi termasuk program kerja dan kegiatan sebagai landasan strategis bagi Pengurus Tahun 2021-2025, terdapat beberapa keadaan yang terjadi pada saat alih kepemimpinan, antara lain:

1. Ditemukannya pengelolaan keuangan Yayasan yang digunakan secara non prosedural yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga, sebagaimana hasil Temuan Pengawas Yayasan;
2. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan untuk Tahun 2019 dan 2020, masih menyisakan catatan perbaikan dari Pengawas dan Pembina, sehingga Laporan tersebut, masih belum diterima dan Pengurus yang baru (Pengurus Periode 2021-2025), tidak berada dalam kewenangan untuk memperbaiki dan mempertanggung jawabkannya;
3. Terdapat tunggakan pajak Badan tahun 2018 termasuk dendanya sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
4. Kondisi keuangan Yayasan atau saldo yang dapat dikelola oleh Pengurus Periode Tahun 2021-2025 sebesar RP 1.717.808.832 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah). Saldo tersebut cukup besar, namun jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya untuk menjalankan program-program strategis yang prioritas, saldo tersebut tidak memadai;
5. Sumber pendapatan utama Yayasan berasal dari iuran pengembangan (kontribusi) dari Unit Kegiatan (UNB dan seluruh SMK), penyewaan gedung pertemuan dan penyewaan asrama. Dilain pihak, pendapatan atau penerimaan Unit Kegiatan, berbasis kepada penerimaan biaya pendidikan (SPP) Mahasiswa/Siswa, sehingga apabila jumlah penerimaan Mahasiswa/Siswa mengalami penurunan, maka akan berdampak langsung kepada pendapatan Yayasan;
6. Terbatasnya kemampuan Yayasan dan Unit Kegiatan untuk menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, selain bertumpu kepada penerimaan SPP, juga tidak memiliki saldo abadi (dana abadi) yang setiap saat mampu digunakan jika ada kebutuhan mendesak;

7. Yayasan dan Unit-unit Kegiatan tidak memiliki Unit Usaha (Bisnis) yang *profit oriented* sebagai alternatif sumber pendapatan;
8. Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan, kesulitan menjamin kebutuhan biaya untuk melakukan pengembangan;
9. Terbatasnya kemampuan SDM Yayasan untuk melakukan penguatan Tata Kelola Kelembagaan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan, yang harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informatika (TI);
10. Banyaknya Regulasi Yayasan yang belum dibuat untuk bisa menjalankan AD/ART Yayasan secara utuh. Jika sebagian sudah ada, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
11. Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset Yayasan. Hampir seluruh aset yang ada, dikelola secara mandiri dan belum ada kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemberdayaan aset;



12. Terjadinya pemindahan kantor Yayasan dari Pulo Raya ke Wisma Griya di Bogor, yang implikasinya bukan saja menyita biaya pemindahan, akan tetapi diikuti juga oleh proses pengurusan perizinan pemindahan domisili Yayasan yang terlebih dahulu harus dibuat Akta Notariat;





**KONDISI TAHUN 2020
Griya Nusa Bangsa**



**KONDISI TAHUN 2025
Griya Nusa Bangsa**



**KONDISI TAHUN 2020
Griya Nusa Bangsa**



**KONDISI TAHUN 2025
Griya Nusa Bangsa**

13. Banyaknya aset-aset Yayasan yang disita oleh Kejaksaan, sebagian diantaranya masih dipergunakan secara aktif sebagai Kebun Percobaan (Fak. Cogreg) Fakultas Kehutanan UNB;



**KONDISI TAHUN 2020
Kebun Cogreg**



**KONDISI TAHUN 2020
Kebun Cogreg**

14. Gedung Pertemuan di Wisma Griya, kondisinya sudah tidak memiliki *performance* yang memadai untuk bisa bersaing dengan gedung pertemuan lain yang sejenis, dan diprediksi akan menghabiskan dana besar untuk melakukan renovasi;



**KONDISI TAHUN 2020
Aula GNB**



**KONDISI TAHUN 2025
Aula GNB**

15. Asrama Wisma Griya Nusa Bangsa, tidak berfungsi dengan baik akibat penyusutan karena usia serta pandemi yang berlarut, sehingga mengurangi sumber penerimaan Yayasan;



**KONDISI TAHUN 2020
Kamar GNB sebelah Utara**



**KONDISI TAHUN 2025
Kamar GNB sebelah Utara**



**KONDISI TAHUN 2020
Kamar Wisma Griya NB**



**KONDISI TAHUN 2025
Kamar Wisma Griya NB**



**KONDISI TAHUN 2020
Kamar Wisma GNB**



**KONDISI TAHUN 2025
Kamar Wisma GNB**



**KONDISI TAHUN 2020
Dalam Kamar Wisma GNB**



**KONDISI TAHUN 2025
Dalam Kamar Wisma GNB**



**KONDISI TAHUN 2020
Kamar Mandi Wisma GNB**



**KONDISI TAHUN 2025
Kamar Mandi Wisma GNB**



**KONDISI TAHUN 2020
Ruang Kelas di Wisma GNB**



**KONDISI TAHUN 2025
Ruang Kelas di Wisma GNB**

16. Tingginya komponen pengeluaran gaji pegawai, yang menghabiskan hampir 50% dari jumlah penerimaan Yayasan;
17. Selain tanah wakaf, seluruh bidang-bidang tanah aset Yayasan belum bersertipikat, dan masih tertulis atas nama perorangan.
18. Terdapat tagihan PBB terhutang untuk tanah yang berada di Wisma Griya (termasuk SMK-AK) yang sudah menunggak selama 10 tahun, sehingga kewajiban pokok ditambah dengan denda keterlambatan, **hampir mencapai 2 Milyar rupiah**. Diprediksi Yayasan akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk mensertipikatkan seluruh aset tanahnya, dimulai dari proses pemberkasan, pemenuhan persyaratan, proses penerbitan sertipikat sampai dengan kewajiban membayar pajak BPHTB/PNBP;

19. Terjadinya penyerahan aset tanah di Cogreg yang selama ini digunakan untuk Kebun Percobaan Mahasiswa UNB, tanah di belakang Wisma Griya Nusa Bangsa, Tanah dan Gedung di Jalan Pulo Raya III Jakarta sebagai tindak lanjut penyitaan Aset Yayasan oleh Kejaksaan, tentu saja akan mempengaruhi kinerja Yayasan;



20. Aset tanah di Pabuaran yang digunakan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, tidak berfungsi optimal, karena tidak mempunyai akses jalan masuk kendaraan;



21. Sudah ditetapkannya lokasi tukar menukar harta benda wakaf sebagai kelanjutan dari pengadaan tanah kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (Jalan Tol BORR Seksi dua), yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah kampus UNB, akan tetapi secara fisiografisnya berupa cekungan yang rawan banjir dengan beda tinggi sekitar 5 sampai 10 meter, kondisi penggunaan tanahnya berupa kolam ikan, sehingga akan menyulitkan dan memerlukan biaya besar apabila akan digunakan untuk bangunan gedung sebagai pengembangan atau perluasan Kampus UNB;



22. Proses penggantian tanah wakaf sampai dengan penyerahan hasil menyita banyak waktu, mengingat harta benda wakaf harus menempuh prosedur perizinan yang berbeda jika dibandingkan dengan alas Hak yang bukan tanah wakaf;
23. Berlangsungnya pandemi (Covid-19) mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan, tidak terkecuali pula, turut mempengaruhi tatanan dunia pendidikan, yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.
24. Proses belajar dan mengajar dengan sistem daring, sangat mempengaruhi kinerja Unit Kegiatan, sehingga berdampak pula pada kinerja Yayasan;



25. Terganggunya aksesibilitas dari dan ke arah UNB dan SMK-AK akibat pembangunan gerbang Tol;



26. Penampilan Gedung Kampus UNB yang sudah berumur 30 tahunan, tidak menarik sebagai kampus yang modern di kalangan generasi milenial dan

tidak mempunyai daya saing, jika dibandingkan kampus-kampus lain yang ada di sekitarnya;



27. Akreditasi UNB berada pada *grade* yang paling bawah (Cukup), sehingga apabila Mahasiswanya berasal dari pegawai negeri sipil, maka Ijazahnya tidak dapat digunakan untuk penyesuaian kenaikan pangkatnya.
28. Program Studi di UNB tidak berkembang, sehingga tidak dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain yang mengikuti dinamika pendidikan kekinian.
29. Kondisi SMK-AK, dengan akreditasi Unggul dan jumlah Siswa rata-rata 500 orang per tahun, sangat membanggakan. Namun demikian, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan cukup tinggi. Hal ini disebabkan pengadaan bahan-bahan praktikum kimia dan pemenuhan peralatan Laboratorium harganya cenderung naik setiap tahun. Kondisi seperti itu, jika SMK-AK tidak mampu meningkatkan jumlah penerimaan Siswa baru, maka diprediksi pelayanan SMK-AK tidak bisa meningkat seiring dengan akreditasi yang dimiliki.
30. Pintu masuk SMK-AK yang letaknya sekitar 100 meter dari jalan raya, tidak cukup memadai sebagai wahana publikasi yang mudah diakses oleh masyarakat;



31. SMK Nusa Bangsa di Jampang, mempunyai banyak kendala antara lain; letak sekolahnya sekitar 200 meter dari jalan raya dengan kondisi jalan masuk yang sangat terbatas, bangunan gedung Sekolahnya mendekati tidak layak pakai, sarana dan prasarana penunjang pendidikan sangat terbatas, banyaknya SMK sejenis di sekitar daerah itu, dan jurusan yang ada belum banyak ragamnya

sebagai pilihan ketrampilan, sehingga jumlah Siswanya hanya berkisar rata-rata 150 orang per tahun. Mengingat basis pendapatan SMK Nusa Bangsa Jampang (sama dengan Unit Kegiatan lainnya) bertumpu pada penerimaan SPP, maka SMK Jampang akan sulit melakukan melakukan rehabilitasi bangunan sekolah dan peningkatan sarana pendidikan;



**KONDISI TAHUN 2020
SMK-NB**



**KONDISI TAHUN 2025
SMK-NB Tambah Kelas**

32. SMK JBS Temanggung jaraknya sekitar 500 Km dari Bogor, sehingga kendala jarak tersebut dapat menurunkan pembinaan, dan pengawasan. Selain itu, SMK JBS Temanggung merupakan satu-satunya Unit Kegiatan Yayasan yang tidak menempati aset tanah Yayasan. Tempat penyelenggaraan pendidikan adalah Tanah Pemerintah Daerah, Tanah Perum Jawatan Kereta Api dan Tanah Bengkok Desa. Selain harga sewa yang akan naik secara periodik, juga akan menjadi kendala serius manakala Pemegang Hak Atas Tanahnya akan menggunakan tanahnya. Tanah wakaf Yayasan yang dipunyai, tidak mempunyai akses jalan dan letaknya jauh dari perkotaan. Akibatnya, akan dibutuhkan biaya besar untuk pengadaan tanah agar SMK JBS Temanggung, dapat menjalankan kegiatannya;



**KONDISI TAHUN 2020
SMK-JBS Temanggung**



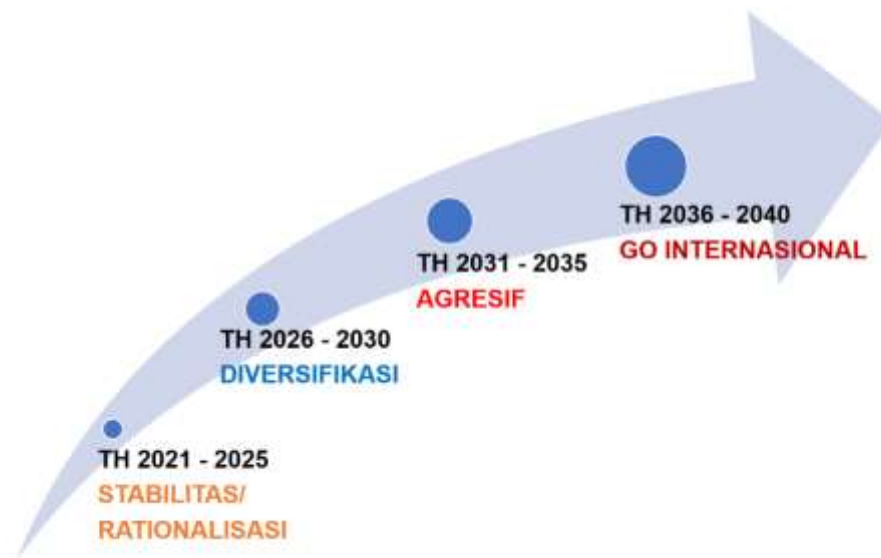
**KONDISI TAHUN 2025
SMK-JBS Temanggung**

4.1. EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

Atas dasar kondisi yang dihadapi Pengurus Periode Tahun 2021-2025 di atas, setelah mengkaji faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi, maka langkah pertama yang ditempuh adalah menyusun hierarki perencanaan yang dimulai dengan menyusun semacam Rencana Induk Pengembangan (RIP) atau *road-map* pengembangan strategis jangka panjang, dengan melibatkan peran

serta seluruh Organ Yayasan dan mengundang Pakar dari UNB. RIP sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada gambar di bawah.

RIP yang disusun untuk menentukan arah perkembangan Yayasan dalam jangka panjang, selanjutnya diuraikan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA), yang diproyeksikan dalam kurun waktu capaian 5 (lima) tahunan. Dalam upaya untuk mewujudkan RENSTRA, dibuatlah rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran dan Pendapatan (RKAPB). Untuk dapat mewujudkan RIP maupun RENSTRA, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, antara lain situasi dan kondisi *force mayor* (pandemi covid-19) maupun kemampuan keuangan.



Gambar 4.1. Rencana Induk Pengembangan (Roadmap) Yayasan PKMK Nusantara 2021-2040 1

4.1.1. Strategi Stabilitas atau Rationalisasi Tahun 2021-2025, atau biasa diistilahkan dengan strategi Recovery.

Yayayasan PKMK Nusantara masih banyak kelemahan dan perlu menata seluruh aset Yayasan agar mempunyai kekuatan hukum dan melakukan renovasi bangunan agar sesuai dengan fungsinya. Stabilitas dimaknai juga bahwa program kerja selama periode tersebut difokuskan pada beberapa hal yaitu penguatan kelembagaan termasuk didalamnya sertifikasi aset Yayasan, penataan organisasi dan penguatan jejaring yang selama ini masih menjadi penghambat bagi gerak langkah Yayasan. Tiga hal tersebut menjadi dasar yang sangat penting bagi Yayasan untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan.

Strategi Stabilitas, akan berjalan dengan sehat dan tujuan dapat dicapai, jika pondasi yang menjadi input dari sebuah kegiatan tertata dengan benar, baik dari sisi administrasi, kepastian aset, dan kekuatan hukum. Input-input yang jelas dan pasti, akan menjadi kekuatan bagi Yayasan untuk membangun jejaring yang saling menguntungkan baik dengan pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya.

Sebagai sebuah organisasi nirlaba yang memiliki visi menjadi Yayasan penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang profesional dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, yang akan berdampak pada semakin sehatnya kinerja keuangan Yayasan dan Unit Kegiatan. Kemandirian pendanaan keuangan Yayasan sangat dibutuhkan, agar operasional organisasi dapat berjalan baik untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan didirikan.

Undang-Undang memperkenankan Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha (*to established*) dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha (*to participate*) dengan tujuan agar kegiatan usaha tersebut, nantinya akan menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan PMK-Nusantara sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. Apabila seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA dapat terwujud dengan capaian yang baik, maka Yayasan akan siap memasuki strategi berikutnya, yaitu strategi pengembangan. Namun apabila karena satu dan lain hal, capaian RENSTRA nya rendah, maka Yayasan perlu melanjutkan program dan kegiatan yang belum terwujud, untuk dikerjakan pada tahun pertama RENSTRA 2026-2030.

4.1.2. Strategi Diversifikasi atau strategi Pengembangan Tahun 2026 – 2030

Titik berat strategi ini adalah melakukan berbagai inovasi untuk menjamin usaha yang bersifat profit, agar Yayasan mampu menjamin kebutuhan pendanaan seluruh Unit Kegiatan secara berkelanjutan, terbangunnya lingkungan yang dinamis, menangkap peluang yang dihasilkan melalui kemampuan berkreasi dan berinovasi agar mampu memberikan *return* yang tinggi. Untuk itu pada tahap ini, dengan asumsi bahwa upaya membangun lembaga yang kuat telah tercapai, organisasi yang rapi dan jejaring yang luas sudah dipunyai, maka Yayasan harus fokus memperbanyak kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kegiatan dengan memanfaatkan SDM dan aset yang dimiliki untuk mendukung kemandirian Yayasan.

4.1.3. Strategi Agresif Tahun 2031–2035

Strategi ini menggambarkan upaya dengan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki Yayasan melalui kegiatan terpadu dan terencana untuk menghadapi persaingan yang ada. Strategi agresif dapat digunakan manakala Yayasan telah memiliki kekuatan-kekuatan untuk menangkap peluang, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Yayasan lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya, berdaya saing tinggi, sehingga memiliki kegiatan yang memberi return yang positif.

4.1.4. Strategi Go-Internasional Tahun 2036 – 2040

Strategi ini menggambarkan kemampuan Yayasan PKMK Nusantara, mampu beradaptasi dan bersaing pada skala Internasional dengan memiliki Unit Kegiatan yang juga telah berkiprah dalam skala Internasional. Kemajuan teknologi dan globalisasi, menuntut agar bisa menempatkan diri pada posisi yang mampu bersaing dalam skala

internasional agar Yayasan bisa bertahan. Kemampuan untuk bertindak agresif sebagaimana tujuan dari tahap ke 3 Roadmap Yayasan PKMK Nusantara sangat dibutuhkan, untuk mampu bersaing dalam skala Internasional.

4.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

4.2.1. Evaluasi Pemilihan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Lima Tahunan/Renstra Yayasan PKMK Nusantara Tahun 2021-2025 yang tetap difokuskan pada Stabilitas/Rasionalisasi, atau dalam tahap *Recovery* dimana Yayasan mengembangkan 6 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan perangkat peraturan sebagai penguatan tata kelola kelembagaan Yayasan PKMK Nusantara.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi, agar memiliki daya saing kuat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Yayasan PKMK Nusantara, yang berkontribusi pada kemajuan.
4. Mengoptimalkan kualitas kinerja sumberdaya Yayasan PKMK Nusantara yang mempunyai keunggulan kompetitif.
5. Meningkatkan layanan eksternal Yayasan PKMK Nusantara di bidang pendidikan formal dan non-formal, & kemiteraan.
6. Meningkatkan pelayanan internal yang harmonis antara Pembina, pengurus, pengawas dan unit-unit melalui rapat koordinasi, konsultasi dan pengawasan yang transparan memfasilitasi akreditasi, membina unit-unit kegiatan dan badan usaha.

Secara garis besar misi tersebut telah dilaksanakan dengan melalui program strategis yang diwujudkan dalam 4 program yaitu :

- 1) **Peningkatan Status dan Pendayagunaan Aset;**
- 2) **Diversifikasi Usaha;**
- 3) **Penataan dan Perbaikan Sarana & Prasarana;**
- 4) **Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan.**

4.2.2. Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis

Didasarkan pada Target dan Realisasi Belanja berdasarkan RKAPB Yayasan PKMK Nusantara yang diuraikan menjadin 4 Program Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Periode 2021 - 2025 1

PROGRAM KERJA	KEGIATAN	HASIL
1. Peningkatan status dan Pemberdayaan aset	1. Penyelesaian administrasi pertanahan aset yayasan;	1. Tersertifikatnya sebanyak 13 bidang tanah (92%) atas nama yayasan
	2. Membangun kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak-pihak lain;	2. Dokumen Kontrak kerjasama pemanfaatan aset tanah sebanyak 3 dok. (100%)

PROGRAM KERJA	KEGIATAN	HASIL
	3. Memaksimalkan kerohiman tanah-tanah yang dilelang.	3. Mendapat uang kerohiman 300 jt rupiah dari pelelangan tanah Cogreg
	4. Renovasi Griya;	4. Terealisasinya renovasi Wisma Griya Nusa Bangsa Baru sesuai rencana 99,9 %
2. Diversifikasi Usaha	1. Peningkatan pengelolaan Griya Nusa Bangsa.	1. Griya Nusa Bangsa menjadi unit yang dapat disewakan 100%
	2. Pemanfaatan ruang terbuka (kegiatan komersial <i>outdoor</i>);	2. Ruang terbuka hijau Unit-unit Yayasan telah dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan.
	3. Membuka unit usaha baru	3. Terbangunnya Hotel, ruang rapat dan Asrama mahasiswa/siswa
3. Penataan dan perbaikan sarana & prasarana	1. Pembenahan kantor yayasan;	1. Tersedianya fasilitas kantor yang memadai 100%
	2. Pengadaan peralatan perangkat IT	2. Tersedianya peralatan IT sesuai perkembangan teknologi (Laptop, PC, Ext.HD,
	3. Menyusun Data Base;	3. Terkoneksinya database yayasan dan unit (100%)
	4. Membuka diklat/kursus non-formal;	4. Terselenggaranya diklat/ kursus kerjasama dengan PT ZEN Solution
	5. Fasilitasi Pembukaan prodi baru ;	5. Terselenggaranya 4 prodi tingkat SMK
	6. Membangun jejaring dengan stakeholder (penyebarnya lulusan)	6. Terbentuknya 3 jejaring dengan Pemerintah (KIP/Diknas), Swasta (PTS) dan Alumni UNB dan SMK
4. Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan	1. Penyusunan media komunikasi dan Publikasi berbasis digital	1. Tersedianya media komunikasi dan publikasi berbasis digital (Web Yayasan, Podcast, Sosmed, Sewa Host internet, langganan WIFI)
	2. Revisi ART;	2. Revisi ART dilakukan tahun 2021 Revisi ART dilakukan tahun 2025
	3. Menyusun SOP pengajuan pimpinan unit, pengawasan, kode etik, kepegawaian.	3. Tersedianya dokumen SOP/POB: Revisi Statuta Pedoman penyiapan LHP Revisi Peraturan Kepegawaian SOP Pembinaan SOP Monev SOP Pengawasan Keuangan Revisi Statuta UNB Tata kelola UNB Revisi Tata Kelola UNB Penyusunan Tata Kelola SMK Penggunaan dan Pemanfaatan Wisma Griya
	4. Penyusunan peraturan kepegawaian	4. Tersedianya dokumen kepegawaian
	5. <i>Family Gathering</i> .	5. Terselenggaranya <i>Family Gathering dalam bentuk kegiatan Halal Bihalal, Buka Puasa Bersama, Hari besar keagamaan, Jalan Sehat</i> .
	6. Rapat koordinasi, konsultasi, YPKMK dan unit-unit;	6. Terselenggaranya Workshop, Konsultasi Teknis, Penyusunan RKAPB/RKAS
	7. Pembinaan dan pengawasan YPKMK terhadap unit-unit	7. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Yayasan tahun 2021 dan 2023 dan Unit 2021, 2022 dan 2023.
	8. Peningkatan pengawasan dan	8. Pengawasan dilaksanakan oleh

PROGRAM KERJA	KEGIATAN	HASIL
	akuntabilitas	pengawasan eksternal

4.3. MASALAH STRATEGIS

Dinamika permasalahan yang dihadapi selama kurun waktu lima tahun (2021-2025) akan disampaikan pointernya saja, mengingat uraian lengkap dan langkah-langkah Pengurus untuk mengatasi masalah tersebut, selalu diraikan dalam setiap laporan pertanggung jawaban tahunan.

Permasalahan strategis yang selalu berulang dari tahun ke tahun adalah, masalah keterbatasan keuangan Yayasan. Seyogyanya sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan, harus mampu menjamin kebutuhan biaya untuk peningkatan dan pengembangan, baik sarana dan prasarana, maupun peningkatan kesejahteraan pegawainya. Berbagai upaya telah ditempuh, antara lain dengan hibah bantuan pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat, namun lazimnya bantuan hibah, tidak dapat ditentukan besarnya, tergantung keleluasaan pemberi hibah. Selain itu, upaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak, belum membuahkan hasil yang signifikan. Demikian pula dengan optimalisasi sebagian kamar Asrama Mahasiswa menjadi hotel, juga tidak menggembirakan. Ada baiknya, pengurus mendatang lebih progresive lagi membangun usaha sendiri melalui pembentukan Unit Kegiatan yang bersifat bisnis.

Dari laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun anggaran, khususnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi, akan diuraikan seperti Berikut;

4.3.1. Masalah Strategis Periode Tahun 2021-2025

Dinamika permasalahan yang dihadapi selama kurun waktu lima tahun (2021-2025) akan disampaikan pointernya saja, mengingat uraian lengkap dan langkah-langkah Pengurus untuk mengatasi masalah tersebut, selalu diraikan dalam setiap laporan pertanggung jawaban tahunan.

Permasalahan strategis yang selalu berulang dari tahun ke tahun adalah, masalah **keterbatasan keuangan Yayasan**. Seyogyanya sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan, harus mampu menjamin kebutuhan biaya untuk peningkatan dan pengembangan, baik sarana dan prasarana, maupun peningkatan kesejahteraan pegawainya. Berbagai upaya telah ditempuh, antara lain dengan hibah bantuan pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat, namun lazimnya bantuan hibah, tidak dapat ditentukan besarnya, tergantung keleluasaan pemberi hibah. Selain itu, upaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak, belum membuahkan hasil yang signifikan. Demikian pula dengan optimalisasi sebagian kamar Asrama Mahasiswa menjadi hotel, pendapatannya tidak

menggembirakan. Ada baiknya, pengurus mendatang lebih progressive lagi mendirikan Unit Usaha melalui pembentukan Unit Kegiatan yang bersifat bisnis.

Dari laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun anggaran, khususnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi, akan diuraikan kembali intisarinya di bawah ini. Hal ini penting untuk diketahui Pengurus 2025-2030, sehingga dapat mencari solusi jitu untuk mengatasinya.

4.3.2. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2021

Selama pelaksanaan tahun anggaran 2021, Pengurus Yayasan PKMK Nusantara, telah menginventarisir beberapa masalah strategis yang dijumpai, antara lain adalah:

1. Penyelesaian pembebasan tanah, berlarut-larut.
2. Pensertipikatan Aset Yayasan, terkendalanya pemberkasan (pemenuhan persyaratan) karena harus memperbaharui seluruh surat-surat tanah yang ada, dan tersebar di banyak pemegang hak, pelunasan tunggakan PBB yang sangat besar, proses penerbitan surat Keputusan Pemberian Hak-nya, sebagian merupakan kewenangan BPN Tingkat Provinsi, dan yang pasti Yayasan kesulitan biaya.
3. Pelaksanaan Kerjasama (MoU) dengan berbagai pihak, membutuhkan proses yang intensif, dilain pihak Yayasan kekurangan SDM yang memadai;
4. Banyaknya Peraturan/Keputusan, yang perlu dibuat untuk dapat menjalankan AD/ART secara utuh, dan banyak regulasi yang perlu direvisi mengingat sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perlu penyesuaian dengan adanya perkembangan perubahan peraturan pemerintah.
5. Sumber-sumber penerimaan Yayasan, terbatas.
6. SDM yang dipunyai Organ Yayasan, memerlukan proses penyesuaian dari etos kerja berlatar belakang birokrasi, menjadi pemerhati atau praktisi dibidang pendidikan. Selain itu, SDM yang ada belum terbiasa membuka kegiatan usaha berbasis kelembagaan.
7. Secara umum, Unit Kegiatan yang dimiliki Yayasan, belum berdaya saing tinggi.
8. Banyaknya gedung/bangunan, yang terletak di Wisma Griya maupun Bangunan pada Unit Kegiatan, memerlukan renovasi berat untuk bisa berjalan sesuai fungsinya.
9. Manajemen pengelolaan Unit Kegiatan, perlu terintegrasi satu sama lain dan memerlukan pembinaan maupun pengawasan yang intensif.

4.3.3. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2022

Setiap masalah strategis yang dihadapi dalam kurun waktu satu tahun anggaran, selalu ditempuh solusi untuk mengatasinya. Akan tetapi, kadang-kadang masalah strategis tersebut, karena satu dan lain hal, tidak mampu diselesaikan antara lain karena kesulitan keuangan yang tidak kunjung bisa diatasi, atau karena adanya kebijakan regulasi pada Instansi lain yang berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi Yayasan, seperti misalnya, tukar menukar harta benda wakaf.

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2022, Pengurus Yayasan PKMK Nusantara, telah menginventarisir beberapa masalah strategis yang dijumpai, ada masalah yang berulang yang terjadi pada tahun 2021, ada juga masalah baru yang timbul kemudian. Beberapa masalah yang dihadapi tahun 2022, antara lain adalah:

1. Penyelesaian pembebasan tanah, tidak kunjung selesai.
2. Harta Benda Wakaf, tidak bisa diganti dalam bentuk Uang Ganti Rugi, melainkan harus dilakukan tukar menukar harta benda wakaf. Hal ini menyulitkan Yayasan, selain harus menempuh prosedur persetujuan tukar menukar yang birokrasinya panjang, dan Yayasan sangat membutuhkan biaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA.
3. Kerjasama (MOU) dengan berbagai pihak, tidak berjalan dengan baik, seperti penundaan MoU dengan Yayasan Adi Sanggoro, karena keterbatasan keuangan Yayasan (sharing pendanaan), penundaan kerjasama dengan Yayasan Garda Nusantara Mandiri Cianjur sampai dengan dana KIP terealisasi, permohonan kepada para pemegang saham PT. Griya Nusa Bangsa menghibahkan seluruh sahamnya kepada Yayasan, memerlukan persetujuan dari para pemegang saham.
4. SDM Yayasan tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai, untuk melakukan penelitian dan pengembangan dunia pendidikan, yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi tuntutan kebutuhan masyarakat masa kini.
5. Unit-unit Kegiatan, secara umum tidak berkembang secara progresif.

4.3.4. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2023

Daftar masalah strategis yang dijumpai, pada tahun 2023, antara lain adalah:

1. Terjadi penurunan *performance* paska pembangunan Jalan Tol, sehingga daya tarik keberadaan SMK-AK maupun Wisma Griya dalam rangka pemasaran hotel, asrama, fasilitas rapat maupun gedung pertemuan, tidak maksimal.

2. Program Penataan Aset (sertipikasi tanah), menyita hampir seluruh Anggaran Yayasan yang tersedia, dan belum seluruh aset bersertipikat atas nama Yayasan PKMK Nusantara.
3. Renovasi bangunan gedung baik di Wisma Griya maupun di Unit Kegiatan, terbengkalai.
4. Rendahnya Mahasiswa Baru yang mendaftar di Universitas Nusa Bangsa, telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan, apabila jumlah Mahasiswa Baru terus menerus mengalami penurunan, maka UNB akan kesulitan membiayai Gaji Pegawai dan menyelenggarakan proses belajar-mengajar serta membiaya kegiatan rutin lainnya. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi berdampak hukum bagi Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan.
5. Berbagai Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra 2021-2025, tidak bisa tercapai atau memerlukan waktu lebih lama, karena kesulitan biaya.
6. Yayasan menghadapi kesulitan keuangan yang sangat serius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Pengurus memandang perlu meminta persetujuan Pembina untuk melakukan penjualan salah satu aset Yayasan, agar Pengurus bisa menyelesaikan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,
7. Penambahan jumlah Mahasiswa melalui jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP), menghadapi banyak kendala.

4.3.5. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2024

Pengurus telah menginventarisir berbagai jenis masalah strategis yang dihadapi pada tahun anggaran 2024, sekurang-kurangnya antara lain adalah;

1. Kondisi keuangan Yayasan, terbatas;
2. Legalisasi aset Yayasan, belum tuntas;
3. Pemanfaatan aset Yayasan, belum optimal;
4. Penataan sarana dan prasarana pendukung Yayasan serta penataan lingkungan, belum selesai;
5. Kondisi Bangunan Wisma Cimanggu, tidak berfungsi dengan baik;
6. Pemahaman dan kepatuhan Unit-unit Kegiatan terhadap Peraturan Yayasan, masih lemah;
7. Kinerja UNB, belum optimal bahkan sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Hal ini antara lain dicerminkan UNB kesulitan membayar gaji.
8. Pembangunan Ruang Belajar SMK Nusa Bangsa (Jampang), tersendat;
9. Sarana Parkir Kendaraan di lingkungan Griya dan SMK-AK, tidak mencukupi;

10. Sarana dan Prasarana SMK-JBS Temanggung, tidak memadai;
11. Kepengurusan Yayasan akan berakhir pada Tahun 2025, yang masih meninggalkan berbagai program dan kegiatan yang belum tuntas dan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada awal Kepengurusan 2025-2030, karena merupakan pra syarat untuk memasuki strategi progresif.

4.3.6. Masalah Strategis Yang Dihadapi Pada Tahun 2025

Memasuki akhir kepengurusan periode 2021-2025, masalah subsansial soal keuangan, belum juga bisa teratasi bahkan makin krisis. Akan tetapi kemajuan pada program dan kegiatan lain, telah menunjukkan hasil yang nyata.

Secara umum masalah yang dihadapi pada tahun anggaran 2025, didominasi oleh kesulitan keuangan, disamping masih ada masalah lain seperti tunggakan pajak dan sertifikasi aset Yayasan. Masalah tersebut adalah;

1. Hampir seluruh Unit Kegiatan mengajukan permohonan pembebasan atau pengurangan iuran pengembangan Yayasan (kontribusi). Bahkan UNB sudah dua tahun terakhir tidak mampu memenuhi iuran pengembangan Yayasan;
2. Universitas Nusa Bangsa kesulitan membayar gaji karyawan (Dosen dan Tenaga Kependidikan), dan tidak mampu membiayai modal kerja penerimaan Mahasiswa baru;
3. Kenaikan akreditasi program studi di UNB, dari strata **baik** menjadi **baik sekali** telah menyita sumber pendanaan yang dipunyai;
4. Pembentukan Pusat Studi Hukum Pertanahan dan Perumahan, belum produktif;
5. Penambahan Program Studi baru yang diharapkan menjadi daya tarik bagi Calon Mahasiswa Baru, terkendala oleh regulasi pemerintah yang melakukan moratorium untuk jurusan hukum, selain itu penambahan Jurusan/Program Studi memerlukan dukungan pendanaan yang memadai;
6. Kinerja UNB terganggu antara lain adanya pemberhentian tidak dengan hormat seorang Dosen dan seorang Tendik, dan pengunduran diri 4 (empat) orang Dosen, serta adanya penolakan besaran uang pesangon pensiun karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
7. Terbitnya regulasi pemerintah yang mengatur standarisasi Sekolah Kejuruan terutama pemenuhan standar peralatan, menempatkan Yayasan semakin kesulitan biaya;
8. Tingkat hunian hotel, Asrama dan penyewaan Aula Wisma Griya sebagai penyokong pendapatan Yayasan, tidak mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan modal investasi renovasinya;
9. Kepindahan aktifitas PT. Zen Solusi dari Wisma Griya ke Wisma Cimanggu, disatu sisi berdampak positif berupa pemanfaatan Wisma Cimanggu yang selama ini

tidak berfungsi menjadi aset yang menghasilkan, akan tetapi di sisi lain, pengeluaran Yayasan menjadi bertambah terutama dari beban biaya listrik dan peralatan kebersihan lingkungan, yang selama ini sebagian ditanggung oleh PT. Zen Solusi;

10. Proses legalisasi aset Yayasan (sertipikasi tanah), tidak berlanjut karena tidak mampu membayar tunggakan PBB dan BPHTB;
11. Kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau di lingkungan Wisma Griya, maupun kerjasama dengan pengelola Makan Bergizi Gratis, belum berjalan. Sedangkan kerjasama dengan PT. Galaxy Star, belum tercapai kesepakatan tentang besaran kontribusi atau pembagian keuntungan dari pengelolaan lapangan basket;
12. Pembentukan Unit Bisnis untuk menambah pendapatan Yayasan dan Unit Kegiatan, belum berjalan karena kesulitan modal kerja;
13. Pergantian Organ Pengurus periode 2021-2025 kepada Pengurus periode 2025-2030, akan menyita tenaga, fikiran dan pendanaan;
14. Terjadinya supervisi intensif dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap tanah-tanah Yayasan yang disita, selain menata kembali batas-batas kepemilikan yang jelas, perlu mendapat perhatian serius ketika tanah yang disita tersebut, akan dilelang. Yayasan perlu menentukan sikap, apakah akan ikut menjadi peserta lelang atau bekerjasama dengan pemenang lelang.

BAB V PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai rencana dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga.

Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi/individu dalam menjalankan tugasnya.

5.1. Pengawasan Internal Organ Pengawas

Obyek Pemeriksaan/Pengawasan meliputi 5 (lima) Unit Kegiatan, yaitu: (1) UNB; (2) SMKAK; (3) SMK NB Jampang; (4) SMK NB Temanggung; dan (5) Yayasan PKMK Nusantara. Pemeriksaan terhadap SMK dilakukan selama 3 (tiga) hari, UNB 4 (empat) hari, sedangkan SMK NB Temanggung 5 (lima) hari karena 2 (dua) hari untuk perjalanan pp ke lokasi.

Terdapatnya kegiatan yang lebih prioritas, anggaran tahun 2024 direvisi, dialihkan peruntukannya. Pemeriksaan terhadap SMK tidak dilakukan di lokasi tetapi dilakukan pemeriksaan berkas-berkas (dokumen) pelaksanaannya di Griya Nusa Bangsa, sedangkan terhadap UNB dan Yayasan tidak dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan dilaporkan tertulis untuk dibahas bersama pimpinan Unit terkait, dan selanjutnya setelah dilakukan pemutakhiran dibahas bersama Pembina dan Ketua Yayasan.

Temuan hasil pengawasan/pemeriksaan pada Unit-unit Kegiatan dan Yayasan tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan UNB 1

No.	Temuan/Pemeriksaan Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Adanya beberapa Fakultas yang belum menyusun Renstra dan Roadmap Penelitian	-	RKAPB yang merupakan penjabaran Renstra 5 Tahunan belum optimal pemanfaatannya dalam perencanaan program dan kegiatan		-
2.	Banyak Dosen Tetap merangkap sebagai Pejabat Struktural	-	Aset Produktif Yayasan yang di kelolah UNB belum di manfaatkan Optimal untuk pengembangan sumber pendanan		-
3.	UNB belum membentuk Tim	-	Status Akreditasi merupakan faktor pendukung minat calon	-	-

	khusus untuk menyusun RKAPB		mahasiswa dalam memilih bidang studi		
4.	BANYAK HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH LPPM yang sudah di publikasi tetapi tidak ada di perpustakaan UNB		Penyampaian Usulan RKAPB serta laporan bulanan dan tahunan tidak tepat waktu		
5.	Penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya mempedomani ISAK 35				

Tabel 5.2. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan **SMK-AK** NB 1

No.	Temuan/Pemeriksaan Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1		Dalam Pengadaan Barang dan Jasa belum di bentuk panitia pengadaan barang dan jasa	-RKAS belum realistis.	-Tanda bukti bayar (kwitansi) belum di tanda tangani penerima uangnya dan tanggalnya berbeda.	
2		Masih kekurangan tenaga guru sehingga masih ada guru yang mengajar lebih dari 1 mata pelajaran	-Usulan RKAS belum disampaikan tepat waktu.	-Perbaikan lapangan basket di perkirakan tidak bertahan lama akibat di timpa hujan.	
3			-Perubahan target fisik dan biaya tidak didahului usulan revisi.		
4			-Tanda bayar kwitansi		

			pengadaan barang melalui petugas sekolah.		
5			-Belum memuat program/kegiatan prioritas yang mengacuh pada RENSTRA.		

Tabel 5.3. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan **SMK-NB Jampang 1**

No.	Temuan/Pemeriksaan Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1		Bendahara masih melakukan pembukuan dengan Sistem Lama (Konvensional)	-RKAS belum realistis.	-Pengadaan barang / jasa dengan dana besar belum dilakukan oleh tim pengadaan barang / jasa.	
2		Masih kekurangan tenaga pengajar sehingga masih banyak tenaga guru yang mengajar lebih dari 1 mata pelajaran	-Usulan RKAS belum disampaikan tepat waktu.	-Belum dibuat Surat Keputusan (SK) pelaksanaan kegiatan RKAS.	
3		Penataan ruang perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan belajar.	-Perubahan targer fisik dan biaya tidak didahului usulan revisi.	-Terdapat pembayaran uang transport yang besaran berbeda untuk lokasi tujuan yang sama.	
4			-Tanda bayar kwitansi pengadaan barang melalui petugas sekolah.		

5			-Belum memuat program/kegiatan prioritas yang mengacuh pada RENSTRA.		
---	--	--	--	--	--

Tabel 5.4. Hasil Temuan Pemeriksaan Unit Kegiatan **SMK-JBS Temanggung 1**

No.	Temuan/Pemeriksaan Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1		Penyusunan Kurikulum belum terdokumentasi secara lengkap belum ada notulen	- RKAS belum realistis.		
2			- Usulan RKAS belum disampaikan tepat waktu.		
3			- Perubahan target fisik dan biaya tidak didahului usulan revisi.		
4			- Belum terlaksana pembelian tanah.		

Tabel 5.5. Hasil Temuan Pemeriksaan **Yayasan PKMK Nusantara 1**

No.	Temuan/Pemeriksaan Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Laporan pertanggung-jawaban tahunan Yayasan PKMK Nusantara TA 2020 di Tolak.		Program / Kegiatan dalam RKAPB tidak dapat teralisasi maksimal karena anggarannya untuk penyelesaian program / kegiatan yang lebih prioritas dan mendesak.		
2.	Laporan Keuangan belum memakai Sistem ISAK 35		Keterbatasan sumber pendanaan dan SDM merupakan Hambatan		

			pengembangan fungsi dan tugas Yayasan		
3.	Kontribusi Pengembangan yayasan belum di lunasi masing-masing unit		Sinergitas fungsi dan tugas dalam kepengurusan belum optimal untuk meningkatkan pengembangan yayasan.		
4.	Penanganan masalah tanah wakaf yg terkena pembangunan jalan tol belum optimal		Aset Yayasan belum berfungsi maksimal dan produktif		
5.	Pengurusan Status Hak Atas tanah Aset yayasan belum tuntas Aset Tanah Pabuaran belum di manfaatkan maksimal		Pelaksanaan Legalitas Aset Tanah yayasan terhambat karena keterbatasan Dana		

5.2. Pengawasan Internal Penjaminan Mutu UNB

Audit internal oleh UNB dilakukan terhadap AMI (Audit Mutu Internal) adalah sebagai berikut:

1. Audit Mutu Internal (AMI), serta SOP-SOP yang terkait. Berdasarkan tata pamong UNB, LP-Mutu merupakan organ SPMI tingkat universitas, dan TPM bertugas di tingkat fakultas. SPMI UNB mengacu pada dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan, manual terdiri atas manual penetapan-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan, dokumen standar, dan dokumen formulir.
2. Strategi untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan dan tujuan SPMI UNB, ditempuh melalui beberapa tahapan kegiatan. Tahapan tersebut diantaranya adalah 1). sosialisasi program kepada pihak terkait sehingga kebijakan SPMI dapat dipahami dan diimplementasikan secara baik pada setiap unit kerja; 2). Evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan monev dan AMI, sehingga diketahui kendala, kelemahan, efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar; 3). Pengendalian pelaksanaan standar agar dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar; 4) peningkatan standar melalui pengamatan, diskusi

dengan para pemangku kepentingan, dan studi pelacakan lulusan. Sehingga berdasarkan buku dokumen kebijakan SPMI UNB, pelaksanaan SPMI di UNB dapat berjalan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dan semuanya ini dimaksudkan untuk: (a) Mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nusa Bangsa, (b) Memenuhi kepentingan dan tuntutan para pihak (*stakeholders*) terkait pelaksanaan proses belajar mengajar, dan hasil lulusan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (c) Ketaatan pada aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, (d) Membentuk budaya mutu di lingkungan civitas akademika.

3. Penetapan Standar Mutu UNB didasarkan pada Standar Nasional Dikti, dan ditetapkan dalam dokumen SPMI UNB dengan SK Rektor. Pelaksanaan standar mutu SPMI mengikuti buku panduan dan SOP yang telah ditetapkan. Sistem evaluasi dilakukan melalui AMI secara periodik setahun sekali dan kegiatan MONEV pada setiap semester. Proses AMI melibatkan auditor internal yang diangkat berdasarkan surat keputusan rektor, menggunakan instrumen audit berupa daftar tilik, hasil audit dibukukan dalam bentuk Laporan AMI. Ruang lingkup audit adalah bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat terkendali dengan baik dan temuan audit diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terdapat penantangan Bersama "Komitmen Perbaikan". Peningkatan dilakukan baik secara kualitas dan kuantitas, untuk melampaui standar minimal dari SN Dikti.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di UNB telah berjalan secara periodik. Penetapan auditor AMI berdasarkan SK Rektor UNB dan auditor yang diangkat tersebut adalah auditor yang telah lulus pelatihan sertifikasi auditor di LLDIKTI-IV dan pelatihan auditor yang diselenggarakan oleh instansi perguruan tinggi lainnya. Auditor melaksanakan audit dengan menggunakan lembar instrumen audit atau disebut juga dengan daftar tilik. Hasil temuan di tindaklanjuti dan diperbaiki oleh auditee berdasarkan rekomendasi hasil AMI.
5. Sistem perekaman dan dokumentasi mutu disesuaikan dengan panduan dan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil dari monitoring dan evaluasi dirangkum dalam bentuk laporan akhir dan diteruskan kepada pimpinan untuk dijadikan pertimbangan tindak lanjut secara keberlanjutan dalam pengembangan mutu Universitas Nusa Bangsa.
6. Budaya mutu dan praktik baik sudah diupayakan oleh UNB secara sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat pada hasil kegiatan MONEV dan laporan AMI. Hingga saat ini TA 2022/2023, status akreditasi program studi di UNB terakreditasi B dan Baik. Berdasarkan Statuta UNB pada Bab Penjaminan Mutu, terdapat sub bab "Pengawasan Penjaminan Mutu Internal". Pengawasan internal UNB merupakan proses yang integral terhadap Tindakan dan kegiatan unit kerja universitas secara

terus menerus untuk mencapai tujuan universitas melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tepat waktu, pengamanan asset Yayasan, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal UNB memiliki fungsi sebagai: penyusunan program pengawasan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program; pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik Yayasan; pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; pendampingan dan review laporan keuangan; pemberian saran dan rekomendasi; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. Pengawasan Internal bidang non akademik UNB diselenggarakan dengan tujuan: menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan. Pengawasan internal bidang non akademik dilaksanakan dengan pembinaan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, obyektivitas, dan jujur. Pengawasan terhadap pengelolaan non akademik dilakukan oleh yayasan, dengan ruang lingkup: Kebijakan, program, dan kegiatan; Keuangan; Aset; dan Kepegawaian.

7. SPME dilakukan melalui kegiatan akreditasi oleh BAN-PT, hingga saat ini institusi UNB dan seluruh prodi di UNB telah terakreditasi dengan status BAIK hingga Baik SEKALI.

5.3. Rekomendasi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan Internal

1. Diperlukan pemahaman tugas dan kewajiban para pimpinan Unit Kegiatan dalam mengelola program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Yayasan.
2. Diperlukan pemahaman dalam penetapan skala prioritas pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, utamanya dalam penyusunan RKAPB/RKAS.
3. Diperlukan tertib administrasi/pemutakhiran data Inventaris barang/peralatan pada setiap akhir tahun anggaran, untuk perencanaan pengadaan/pemeliharaan barang/peralatan.
4. Diperlukan optimalisasi pengurusan Yayasan sesuai nomenklatur pembagian divisi, dan pengorganisasian pengelolaan RKAPB/RKAS.
5. Pengawasan oleh pimpinan Unit Kegiatan agar lebih ditingkatkan pada saat Evaluasi berkala (setiap triwulan, semester) terhadap capaian target penyelesaian program/kegiatan, sekaligus penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
6. Penyampaian Laporan berkala pelaksanaan RKAPB/RKAS harap disampaikan tepat waktu.
7. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Yayasan PKMK Nusantara tahun 2021-2025 perlu dilakukan sinergitas antar program-program Yayasan

- dengan Unit-unit kegiatan, dalam persiapan RKAPB/RKAS serta pelaksanaannya.
8. Program/kegiatan Yayasan PKMK Nusantara beserta Unit-unit Keegiatannya dilaksanakan mengacu pada RKAPB/RKAS.
 9. Penyusunan konsep RKAPB/RKAS dilakukan oleh Unit-unit Kegiatan berupa program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, untuk dibahas/didalami Pengurus bersama Pengawas tidak tepat waktu.
 10. Penyusunan anggaran dalam konsep RKAPB/RKAS menganut Sistem Anggaran Berimbang yaitu Pengeluaran anggaran tidak melebihi besarnya penerimaan.

5.4. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal

1. Pada awal tahun I pelaksanaan Renstra kepada Unit Kegiatan dijelaskan visi & misi Yayasan PKMK Nusantara, dan penjabarannya dalam program/kegiatan.
2. Menjelang penyusunan RKAPB/RKAS diberikan penjelasan tentang penentuan program/kegiatan strategis & prioritas tahun mendatang.
3. Masing-masing Unit Kegiatan melakukan pemutakhiran data Inventaris Barang/Peralatan meliputi Nama barang/peralatan, jumlah, kondisi (baik/rusak), merek, dan lain-lain.
4. Dibuat uraian tugas masing-masing divisi, serta struktur pengelola RKAPB/RKAS dan uraian tugasnya.
5. Masing-masing unit kegiatan menyiapkan Laporan Triwulan/Semester yg akurat datanya.
6. Pimpinan Unit Kegiatan menyampaikan Laporan Berkala tepat waktu, dan akurasi datanya.

5.5. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yg dilakukan oleh pihak di luar organisasi atau entitas yang diawasi; berarti pengawas tidak memiliki hubungan langsung atau struktural dengan organisasi yang diawasi.

Tujuan utama pengawasan eksternal adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan standar yang berlaku, serta meningkatkan kualitas dan memperkuat pelayanan publik.

Pengawasan Eksternal di Yayasan PKMK Nusantara telah dilakukan pada tahun 2022 oleh Tim Audit Eksternal dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSIA), KPP Pratama Kota Bogor dan *Financial Due Diligence* oleh ADI dan DEKI *Registered Public Accountant* tahun 2023.

5.5.1. Tim Audit Eksternal dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSIA),

Hasil audit terhadap SMK-AK Nusa Bangsa dan SMK-Nusa Bangsa adalah sebagai berikut:

- a. Meliputi 8 standar proses yaitu: kompetensi kelulusan; Isi Pendidikan, Proses Pembelajaran; Penilaian Pendidikan. Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan.; Sarana Pra Sarana; Pengelolaan Pendidikan; Pembiayaan.

- b. Hasilnya terhadap SMK Nusa Bangsa Jampang telah sesuai dan BAIK,;
- c. SMK-AK Nusa Bangsa BAIK SEKALI.

5.5.2. KPP Pratama Kota Bogor

Adanya temuan tunggakan pajak tahun 2018 sebesar Rp 18 milyar yang telah beberapa kali diperbaiki laporannya namun belum sesuai dengan penilaian KPP Pratama, Pengawas mengundang KPP Pratama untuk memberikan supervisi dan pembinaan agar kesalahan serupa tidak terulang dikemudian hari.

Dari hasil Asistensi Perpajakan oleh Petugas KPP Pratama, yang semula tunggakan pajak Badan senilai 115 juta menjadi Rp112,533,200,-

5.5.3. ADI dan DEKI Registered Public Accountant

Analisa atas laporan keuangan disajikan untuk hal-hal yang kami pandang perlu diketahui oleh Yayasan PKMK Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan keuangan UNB belum cukup baik, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyajian laporan keuangan antara lain sebagai berikut: UNB menyatakan sudah menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan ISAK 35 mulai bulan Desember 2021, tetapi laporan keuangan per 31 Desember 2022 dan 31 Agustus 2023 yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diisyaratkan oleh ISAK 35 tersebut, misalnya belum ada laporan perubahan aset neto dan arus kas yang dibuat oleh manajemen UNB.
- b. Laporan keuangan belum sesuai PMK 68/PMK/03/2020, dimana Kenaikan Aset Neto atau SHU Sisa Hasil usaha setiap tahunnya seharusnya dianggarkan untuk periode 4 tahun ke depan untuk Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (DPSPG) supaya tidak dikenakan pajak penghasilan. Staf yang menjalankan fungsi akuntansi dan fungsi perpajakan masih digabung atau dibawah bagian keuangan. UNB **belum mencatat dan mengakui Liabilitas Imbalan Pasca Kerja di Laporan keuangan sesuai dengan PSAK dan UU Ketenagakerjaan.** Belum menggunakan accrual basis untuk mencatat semua pendapatan dan biaya-biaya. Belum membuat rekonsiliasi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 antara yang tercatat di SPM PPh 21 dan yang dicatat di laporan penghasilan (pendapatan dan pengeluaran). Pembelian aset tetap (Inventaris) dicatat sebagai beban-beban tidak terikat. Belum memiliki kebijakan akuntansi pokok dan prosedur sistem informasi akuntansi yang baku untuk mencatat dan membukukan transaksi keuangan yang ada di UNB.

Hutang lain-lain adalah piutang dan penerimaan piutang yang bersaldo kredit.

- c. Analisa Kondisi Keuangan UNB Dilihat dari laporan keuangan yang ada, kondisi keuangan UNB cukup bagus terlihat dari rasio-rasio utama UNB seperti rasio likuiditas, rasio hutang, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas yang cukup bagus per 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022 kecuali rasio net profit margin minus 0,11 per 31 Desember 2022 artinya rugi bersih setelah pajak 1,11 kali total pendapatan, dan rasio *return on equity* minus 0,65 per 31 Desember 2022 artinya rugi bersih yang dihasilkan adalah 0,65 kali total ekuitas berarti UNB belum maksimal menghasilkan kenaikan aset neto di tahun 2022 karena rasio yang dihasilkan jauh dari 1 atau 100%. Rasio-rasio ini belum mencerminkan keadaan sebenarnya karena laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan PSAK.
- d. Analisa Transaksi Pihak Berelasi Tidak ada transaksi dengan pihak berelasi.
- e. Analisa Pos Aset Tetap Semua Tanah yang digunakan atau tempat berdirinya UNB adalah milik Yayasan PKMK Nusantara.- Semua Bangunan yang digunakan UNB adalah milik Yayasan PKMK Nusantara. UNB belum mencatat dan mengakui harga perolehan dan penyusutan aset tetap (baik yang dibeli dengan dana UNB sendiri maupun hibah dari pihak ketiga) di laporan keuangan per 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022.
- f. Analisa Pos Perpajakan UNB sudah melaporkan PPh Pasal 21 secara rutin setiap bulannya - UNB sudah melaporkan PPh Badan secara rutin setiap tahunnya. UNB belum melakukan pemotongan pajak terkait pembayaran fee/natura ke pihak lain, hal ini akan membuat potensi kewajiban pajak bagi UNB di masa depan apabila laporan keuangan UNB diperiksa kantor pajak. Pemeriksaan Pajak 5 Tahun terakhir (2018-2022); tahun 2018 sudah diperiksa kantor pajak, tahun 2019- 2022 belum diperiksa kantor pajak. Jika laporan keuangan UNB tahun 2019-2022 di tahun-tahun mendatang diperiksa kantor pajak maka akan dapat menimbulkan potensi kewajiban pajak di masa depan.

Atas dasar temuan di atas, Adi dan Deki memberikan rekomendasi untuk perbaikan UNB sebagaimana diuraikan di bawah:

a. Saran Sangat Prioritas (Mendesak):

1. Dalam laporan keuangan UNB untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, agar segera membukukan dan mencatat aset tetap beserta akumulasi penyusutan.
2. Dalam laporan keuangan UNB untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, agar segera membukukan dan mencatat hutang

imbalan paska kerja bagi karyawan tetap UNB.

3. Menyusun laporan keuangan UNB dengan berpedoman pada ISAK 35 dan SAK ETAP serta PMK68/PMK/03/2020.
4. Melakukan studi banding ke Universitas lain untuk perbandingan atas tool dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Membuat kebijakan akuntansi pokok dan prosedur sistem informasi akuntansi yang lengkap untuk mencatat dan membukukan transaksi keuangan.

b. Saran Semi-Prioritas:

1. Meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran untuk supaya UNB memperoleh kenaikan aset neto (keuntungan) yang signifikan untuk mempertahankan kelangsungan hidup UNB dengan melakukan promosi kampus secara lebih tepat untuk menarik mahasiswa baru kuliah di UNB. Menerapkan akrual basis untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran, membuat semua rekonsiliasi akun-akun perpajakan secara rutin dan membenahi filing dan penyimpanan bukti-bukti transaksi agar semua transaksi didukung dengan bukti yang cukup dan memadai.
2. Staf yang menjalankan fungsi akuntansi seharusnya personil yang terpisah dengan personil yang menjalankan fungsi perpajakan.
3. Sebaiknya merekrut beberapa karyawan tetap/tidak tetap atau mentraining staf yang sudah ada untuk melakukan fungsi-fungsi akuntansi, keuangan, dan pajak yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan pajak yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.
4. Pencatatan BPJS Kesehatan dan tenaga kerja agar dicatat ke dalam kelompok accrued expenses 6. Uang muka seharusnya dicatat sebagai Aset Lancar pada laporan keuangan UNB

BAB VI PENUTUP

Mengelola Badan Hukum Yayasan, **berbeda** dengan mengelola Badan Hukum Pemerintahan atau mengelola Badan Hukum *profit oriented*. Mengelola Yayasan harus tunduk kepada Undang-undang Yayasan. Pendiannya dimaksudkan sebagai sarana sosial, sehingga sejauh mungkin harus diproteksi dari kemungkinan adanya niat para pendiri yang hanya ingin mengambil keuntungan. Mengingat bahwa Yayasan adalah lembaga sosial, para pendiri sejak awal sudah berkomitmen, bahwa Yayasan bukan merupakan ajang bisnis, atau mencari keuntungan.

Misi utama Pendidikan Tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pada pasal 1 (satu) disebutkan bahwa Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas **kekayaan yang dipisahkan** dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Walaupun Yayasan bukan Badan Hukum profit, Yayasan **boleh melakukan kegiatan usaha** untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Akan tetapi Yayasan **tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha** kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Kekayaan Yayasan berdasarkan pasal 26, berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selanjutnya pada pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Pengurus wajib;

- (1) Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

- (5) Bertanggung jawab penuh **secara pribadi** apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

UU nomor 16 tahun 2021 tentang Yayasan, telah diubah beberapa ketentuannya oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang perlu diketahui bersama adalah ketentuan Pasal 33, yang menyebutkan;

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.

Sejalan dengan Undang-undang tentang Yayasan, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, menyebutkan pada Pasal 1, Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang mengemban profesi tertentu yang **berbadan hukum nirlaba**, sedangkan Pasal 26 menegaskan mengenai Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 31, mengatur hal-hal sebagai berikut;

- (1) Organisasi PTS **ditetapkan** oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS diatur dalam **Statuta** masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan Undang-undang tentang Yayasan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, disebutkan bahwa **Badan Penyelenggara adalah Yayasan**, perkumpulan, atau **Badan Hukum nirlaba** lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 dan 11, syarat sebagai Badan Penyelenggara yang mendirikan PTS, antara lain wajib;

- a. memenuhi syarat **minimum akreditasi** Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. **kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS** yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.

Badan Hukum Penyelenggara atau Perguruan Tinggi Swasta apabila tidak menjalankan ketentuan dapat dicabut izinnya dan terkena sanksi, bisa sanksi ringan, sedang dan berat, yang diikuti oleh pencabutan izin PTS, sebagaimana diuraikan mulai Pasal 19 hingga Pasal 21. Pencabutan PTS dapat disebabkan oleh;

- (1) PTS dinyatakan **tidak terakreditasi** oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- (2) **Perubahan kebijakan** Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (3) **Diusulkan** oleh Badan Penyelenggara;
- (4) **Pembubaran** Badan Penyelenggara;
- (5) Tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau dikenai Sanksi Administratif berat.

Menteri menetapkan pencabutan izin PTS, selanjutnya Badan **Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik** yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 69 jenis pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan, terdiri atas:

- a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang non-akademik;
- b. perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;

Dalam Pasal 70 diatur mengenai jenis pelanggaran yang dapat dikenakan Sanksi Administratif sedang, antara lain terdiri atas:

- a. Perguruan Tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki Sumber Belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan;
- b. Badan Penyelenggara **tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan** kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Administratif berat diatur pada Pasal 71, dan yang dikenai sanksi berat, jika antara lain terpenuhi;

- a. perguruan tinggi **tidak mengusulkan akreditasi ulang** Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. perguruan tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru dengan **tujuan komersial**;
- c. pengelolaan perguruan tinggi **tidak berprinsip nirlaba**;
- d. perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi;
- e. terjadi **sengketa antar pemangku kepentingan** internal Badan Penyelenggara; antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS; yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, disebutkan juga bahwa Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin PTS, maka;

- a. Dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik.
- b. Badan Penyelenggara mengumumkan melalui media masa nasional.
- c. Badan Penyelenggara harus menanggung seluruh kerugian Mahasiswa, Dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin PTS
- d. Mengembalikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan..

6.1. Kesimpulan

1. Rencana Induk Pengembangan (*roadmap*) Yayasan PKMK Nusantara, masih relevan dan dapat dilanjutkan oleh Pengurus Periode 2025-2030, dengan terlebih dahulu menyelesaikan beberapa kegiatan strategis yang belum berhasil diwujudkan, karena kendala biaya.
2. Renstra Tahun 2021-2025 yang memuat program dan kegiatan, secara umum dapat tercapai. Namun, untuk program pemberdayaan.... terutama kegiatan sertifikasi harus dilanjutkan, menuju kepastian hukum seluruh aset yang tidak bergerak (tanah).
3. Tata kelola Yayasan, semakin baik menuju Yayasan yang profesional. Hal ini diindikasikan antara lain dengan terbitnya MoU sebanyak 10 buah, Peraturan Yayasan sebanyak 9 buah.
4. Perkembangan Unit Kegiatan UNB, dari sisi akreditasi fakultas dan jurusan (program Studi), telah terjadi peningkatan. Jika sebelumnya masih ada prodi dengan status cukup (baik), saat ini seluruh jurusan (program Studi) sudah terakreditasi dengan status baik sekali. Namun demikian akreditasi Perguruan Tingginya (UNB) masih berstatus cukup (baik), tetapi UNB sudah memenuhi seluruh persyaratan dan sedang berproses, untuk mencapai status akreditasi baik sekali.
5. Perkembangan Unit SMK (AK, Nusa Bangsa dan Jenderal Bambang Sugeng), seluruhnya telah terakreditasi, dan secara umum mampu mempertahankan jumlah rata-rata siswa sekolah, atau mampu mempertahankan jumlah penerimaan siswa baru, walaupun jumlahnya tidak signifikan.
6. Perkembangan Sumberdaya manusia dari sisi jumlah pegawai Yayasan menurun, pada tahun 2021 sebanyak 233 orang menjadi sebanyak 210 orang pada tahun 2025. Selain itu, selama kurun waktu 38 tahun, untuk pertama kalinya UNB memiliki satu Orang Guru Besar. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (Kepengurusan periode 2021-2025), terjadi penambahan 6 orang bergelar Doktor baik melalui tugas belajar maupun izin belajar, dan sedang menempuh pendidikan tingkat doktoral sebanyak 9 Orang. Selain itu, telah dilakukan penataan Pejabat Struktural. Rektor dan Wakil Rektor satu bidang akademik, dijabat oleh Guru Gesar, sehingga secara keseluruhan, UNB mempunyai 3 orang Guru Besar.
7. Aset tanah Yayasan telah bersertipikat 92%. Tanah UNB bertambah seluas

4.831 m², tanah dan Bangunan Rumah tinggal di Cimanggu seluas 535 m². Aset bangunan bertambah berupa auditorium UNB, ruang kelas dan tempat praktek di semua SMK.

8. Semua aset belum teradministrasi dengan baik, karena belum diketahui nilai pengadaan, nilai penyusutan, dan nilai akhir
9. Realisasi penerimaan keuangan secara total selama lima tahun mengalami penurunan, sedangkan realisasi pengeluaran secara total selama lima tahun selalu melebihi penerimaan. Rata-rata penerimaan total sebesar **Rp22.235.431.931**, sedangkan rata-rata pengeluaran total sebesar **Rp23.963.248.481**.
10. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Organ Pengawas, sedangkan pengawasan eksternal oleh Tim Audit Eksternal dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSIA), KPP Pratama Kota Bogor, dan ADI dan DEKI *Registered Public Accountant*. Temuan dari segi laporan keuangan terhadap UNB belum mencerminkan keadaan sebenarnya karena laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan PSAK., sedangkan untuk SMK-AK dan SMK Nusa Bangsa telah mengikuti 8 standar proses dengan baik.

6.2. Rekomendasi

Atas dasar uraian di atas dan urgensi penyelamatan Yayasan PKMK Nusantara sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan, maka Pengurus Periode Tahun 2021-2025, menyusun rekomendasi untuk Organ Yayasan dan khususnya untuk Pengurus Periode Tahun 2025-2030, dikelompokkan sebagai berikut;

6.2.1. Rekomendasi Penyusunan Program Dan Kegiatan Strategis

Rencana Induk Pengembangan (Roadmap) Yayasan PKMK Nusantara 2021-2040 yang terdiri dari empat tahapan, yaitu;

- a. Strategi Stabilitas atau Rationalisasi Tahun 2021-2025, atau biasa diistilahkan dengan strategi Recovery;
- b. Strategi Diversifikasi atau strategi Pengembangan Tahun 2026 – 2030;
- c. Strategi Agresif Tahun 2031–2035;
- d. Strategi Go-Internasional Tahun 2036 – 2040.

Masih relevan dan dapat diwujudkan sebagai roadmap 15 tahun kedepan, dengan asumsi setiap tahapan pengembangan, dapat diwujudkan dalam Renstra jangka pendek (5 tahunan).

Apabila dalam Renstra 2021-2025 terdapat program dan kegiatan yang belum tercapai, hendaknya menjadi prioritas kegiatan tahun pertama kepengurusan periode 2025-2026. Sebagai contoh kongkrit program penataan aset Yayasan berupa kegiatan sertifikasi tanah yang belum selesai karena kesulitan keuangan, perlu dituntaskan lebih awal dalam kegiatan strategis Pengurus baru. Kepastian hukum seluruh aset tidak bergerak berupa tanah, menjadi syarat mutlak untuk memasuki

Strategi Diversifikasi atau Strategi Pengembangan yang akan diikuti oleh Strategi Progresif, pada tahap selanjutnya.

Pengurus periode tahun 2025-2030, hendaknya segera menyusun Renstra yang memuat visi & misi serta program dan kegiatan strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan. Mengingat Renstra menjadi arah kebijakan dan titik tolak kesatuan gerak langkah antara Yayasan dan Unit Kegiatan, maka Renstra seluruh Unit Kegiatan, wajib menyesuaikan dengan Renstra Yayasan.

6.2.2. Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Yayasan

- a. Diperlukan pemahaman yang utuh bagi seluruh jajaran Pengurus Periode tahun 2025-2030 tentang Badan Hukum Yayasan terutama tentang konsekuensi, kewajiban dan sanksi sebagai Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan;
- b. Berbagai Peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundangan Pemerintah, terutama peraturan yang berkaitan dengan pegawai dan gaji, perlu segera ditinjau kembali, mengingat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan;
- c. Menciptakan suasana sinergitas kelembagaan yang harmonis antar Unit agar seluruh sumber-sumber pendapatan Yayasan termasuk penerimaan Unit kegiatan perlu dikelola secara langsung oleh Yayasan, dan dihimpun dalam satu rekening tunggal atas nama Yayasan PKMK Nusantara;
- d. Menata kembali dan menyempurnakan kebijakan mengenai aset Yayasan terutama aset yang bergerak atau barang habis pakai dengan satu sistem pengelolaan aset yang akuntabel;
- e. Mengevaluasi bantuan pemerintah baik berupa barang maupun uang yang diberikan langsung kepada Unit Kegiatan;
- f. Menjajagi kemungkinan membentuk Unit atau Divisi Promosi dan Kerjasama pada struktur Organisasi Pengurus Yayasan dengan sistem gaji profit sharing;
- g. Mengupayakan Pengurus Yayasan memperoleh tunjangan kinerja;

6.2.3. Rekomendasi Mengatasi Kesulitan Keuangan

Beberapa langkah yang direkomendasikan untuk dilanjutkan oleh Pengurus periode tahun 2025-2030, antara lain;

1. Menindaklanjuti berbagai MOU yang telah ada menjadi PKS (Perjanjian Kerjasama);
2. Melakukan kerjasama dengan berbagai Instansi Pemerintah maupun Swasta;
3. Mencari donatur baik donatur tetap maupun insidental;

4. Berusaha untuk memperoleh bantuan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan melalui APBN/APBD, CSR, maupun Lembaga Sosial (Nasional dan Internasional);
5. Mengeksplorasi Hak Kekayaan Intelektual atau kerjasama jasa keahlian (Riset, Pusat Studi, Talas Feby, Jasa Analis Kimia, Podcast, Kursus Keterampilan dll).
6. Menata kembali Unit Bisnis (PT. Griya Nusa Bangsa) dari kegiatan usaha Jasa Perhotelan dikembangkan menjadi Jasa Usaha Perdagangan, atau membentuk Unit Usaha Baru, untuk tujuan profit.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka aset Yayasan untuk tujuan komersial;
8. Menata kembali optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset Yayasan agar lebih produktif secara ekonomi;
9. Mencari peluang kemungkinan pemanfaatan Dapur Wisma Griya untuk diswakelolakan kepada Pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG);
10. Menjajaki kemungkinan pembukaan pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-Kanak) atau jasa penitipan anak yang representatif, dengan mengedepankan keunggulan lokasi;
11. Mewujudkan Koperasi Yayasan yang keanggotaannya terdiri dari Pegawai Yayasan dan Organ Yayasan;
12. Melakukan efisiensi anggaran gaji pegawai, melalui pengkajian kembali pegawai tetap menjadi pegawai kontrak untuk pekerjaan yang berorientasi tenaga fisik seperti Pramusaji/Pramubhakti, Petugas Kebersihan/Taman, Sopir, Petugas Keamanan dll atau dikontrak kerjakan melalui pihak ketiga;
13. Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk membiayai kebutuhan operasional rutin Yayasan seperti gaji pegawai, listrik, perawatan Wisma Griya dll, dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan;
14. Memonitor secara berkala proses lelang tanah dan mengupayakan memperoleh kerohiman kepada pemenang lelang;

6.2.4. Rekomendasi Peningkatan Kinerja UNB

1. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan akreditasi Universitas Nusa Bangsa termasuk seluruh prodi yang ada;
2. Mendorong dan memfasilitasi pembukaan prodi baru baik strata satu maupun strata dua;
3. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Instansi Pemerintah (ATR/BPN, Pemda/Pemkot, DPR-D) dan Perusahaan Swasta untuk menempuh program pendidikan strata satu dan dua dengan menawarkan berbagai kemudahan Studi maupun keringanan biaya pendidikan;
4. Mendorong, memfasilitasi dan mengoptimalkan Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Lembaga Penjaminan Mutu untuk dapat menyelenggarakan pelatihan profesi dan dapat menerbitkan

- sertifikasi kompetensi dalam berbagai bidang keahlian (Lingkungan/Amdal/Kehutanan/Pertanian/Kimia, Bahasa, Akuntan/ Perpajakan, Bisnis Retail virtual dll);
5. Membangun kerjasama operasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Badan Penyelenggara Pendidikan lain (sebagai contoh; Muhammadiyah, Universitas Pamulang, Universitas Terbuka, Sekolah Tinggi Pertanahan, Kementerian Agama/Kesehatan/Sosial);
 6. Menata kembali Kelembagaan Dewan Penyantun UNB, untuk berperan aktif mengundang dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tokoh Masyarakat, Pejabat Negara, Pebisnis, Politikus, Para Kepala Sekolah, dll, untuk menjadi Dewan Penyantun UNB;
 7. Melakukan kajian tentang kemungkinan alih kelola management UNB;
 8. Berupaya memperoleh dana segar melalui pinjaman lunak, pinjam pakai aset Yayasan kepada pihak ketiga (tanah atau gedung auditorium/aula pertemuan), sampai dengan kemungkinan penjualan aset yang ada;
 9. Mengevaluasi kembali Pejabat Struktural tertentu di lingkungan UNB agar dijabat oleh Pegawai Tetap UNB;
 10. Mengkaji ulang keberadaan Tenaga Pendidik (Dosen) dengan status dipekerjakan, baik terhadap kinerjanya maupun tunjangan kesejahteraannya;
 11. Menjajagi kemungkinan penyerahan secara sukarela UNB kepada Pemerintah atau Perguruan Tinggi Negeri.

6.2.5. Rekomendasi untuk Pengembangan Unit SMK

1. Mendorong dan memfasilitasi pembukaan jurusan baru yang menjadi trend perkembangan kebutuhan keterampilan masyarakat masa kini;
2. Mendorong dan memfasilitasi Unit Kegiatan sesuai dengan kompetensi keunggulan yang dimilikinya untuk berkreatifitas membuka kerjasama dengan *stakeholder* yang dapat membuka peluang perolehan pendapatan selain penerimaan SPP; (Jasa Perawatan Kendaraan/Computer, Multi Media, Desain Grafis, Digital Marketing, Operator computer, Kursus Kilat, Racikan Obat, Analis Kimia/Uji Laboratorium)
3. Mendorong dan memfasilitasi Unit Kegiatan untuk memperluas kerja sama dengan Para Kepala Sekolah/Pondok Pesantren/Tokoh Masyarakat dengan memberikan *profit sharing* dalam upaya menambah jumlah siswa;
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan unjuk keterampilan (*show of force*) atau kompetisi dalam bidang keunggulan yang dimiliki oleh Unit Kegiatan;

LAMPIRAN

KONDISI GEDUNG-GEDUNG YAYASAN TAHUN 2025

No	Lokasi	Tapak			Kondisi	Keterangan
		Nomor **)	Luas Tapak (m ²)	Jml. Lantai		
1.	GRIYANUSA BANGSA (GNB)	Lobby, Teras depan, Kelas Utama A (VIP) dipakai untuk kantor Yayasan, Kelas Standar B, Kantin, Kamar Asrama Putri dan Putra, Aula, Gudang, Dapur.		2	Kondisinya kurang bagus. Banyak yang perlu diperbaiki.	- Perawatan rutin. - Sudah masuk sebagai aset Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan No.299a/SK/YPKMK/B/XII/2017 tanggal 18-12-2017.
		A	750	2,5	- Sedang	- Perawatan kecil
		B	200	1	- Sedang	- Perawatan kecil
		C	30	1	- Kurang bagus.	- Kurang perawatan
2.	UNIVERSITAS NUSA BANGSA BOGOR	A1	392	2	Sedang	- Perawatan rutin
		A2	66	1	Kurang bagus.	- Renovasi untuk Koperasi.
		B	288	2	Sedang	- Renovasi pengaturan ruang.
		C1	350	3	Sedang	- Perbaiki lab. dan ruang dosen
		C2	350	3	Sedang	- Pengaturan ruang kuliah
		C3	334	3	Sedang	- Pengaturan ruang dosen
		C4	180	4	Bagus	- Perawatan rutin
		Rumah Kaca	88	1	Kurang bagus	- Perbaiki ringan
		Masjid	250	1	Sedang	- Perbaiki ringan
		BEM	100	1	Kurang bagus	- Perbaiki ringan
		Kantin	100	2	Bagus	- Dibangun yang lebih bagus.
		Auditorium	1.000	1,2	Bagus	
- Seluruh bangunan					Sudah masuk sebagai aset Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan No.299a/SK/YPKMK/B/XII/2017 tanggal 18-12-2017.	
3.	SMK-AK NUSA BANGSA, BOGOR	A	480	3	- Bagus	Ukuran sesuai standar yang ditetapkan Diknas.
		B1	168	2	- Bagus	-
		B2	90	2	- Bagus	-
		C1	180	2	- Bagus	-
		C2	90	2	- Bagus	-
		C3	180	2	- Bagus	-
		D	126	1	- Sedang	-
		E	5	1	- Bagus	- Perawatan rutin POS Satpam.
		F	80	1	- Bagus	-
		- Seluruh bangunan				
4.	SMK-NB JAMPANG	A	360	1	- Sedang	- Rehabilitasi ringan.
		B	380	1	- Sedang	- Rehabilitasi ringan.
		C	25	1	- Sedang	- Perawatan rutin
		D	20	1	- Sedang	- Rehabilitasi ringan.
		E	50	1	- Sedang	- Rehabilitasi ringan..

		F	24	1	- Sedang	- Perawatan rutin
		Seluruh bangunan				Sudah masuk sebagai aset Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan No.299a/SK/ YPKMK/B/XII/2017 tanggal 18-12-2017.
5.	SMK-JBS TEMANGGUNG	A	504	1	- Sedang	- Pemasangan papan nama sekolah dibuat dari beton.
		B	80	1	- Sedang	- Perawatan rutin
		C	126	1	- Bagus (2 ruang)	- Satu ruang direhab untuk laboratorium komputer.
		D	80	1	- Bagus	- Perawatan rutin
		E	210	1	- Bagus	- Pasang keramik
		F	180	1	- Bagus	- Perawatan rutin
		G	72	1	- Bagus	- Perawatan rutin
		H	72	1	- Bagus	- Perbaiki ringan. Perbaiki atap bocor.
		Seluruh bangunan				Sudah masuk sebagai aset Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan No.299a/SK/ YPKMK/B/XII/2017 tanggal 18-12-2017.

KONDISI SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2025

No.	Lokasi	Sarana dan Prasarana	Kondisi *)		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	GRIYA NUSA BANGSA (GNB)	Fasilitas Kantor	Cukup	Cukup	Baik
		Ruang Kantor	Cukup	Cukup	Baik
		Meja Kerja dan Kursi	Cukup	Cukup	Baik
		Meja Tamu	Cukup	Cukup	Baik
		Ruang Pertemuan A dan B	Cukup	Cukup	Baik
		Ruang Aula	Kurang	Kurang	Kurang
		Asrama Putri	Cukup	Cukup	Cukup
		Asrama Putra	Kurang	Kurang	Kurang
		Kamar Penginapan	Kurang	Kurang	Kurang
		Toilet	Kurang	Kurang	Kurang
		Dapur	Kurang	Kurang	Kurang
		Pembuangan sampah	Kurang	Kurang	Kurang
		Taman	Kurang	Kurang	Kurang
		Tempat parkir	Cukup	Cukup	Cukup